

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TENTANG PENGELOLAAN ASET
TETAP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PAREPARE**



Oleh :

**IRA FASIRA
NIM : 18.2800.024**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SAYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2023

**ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TENTANG PENGELOLAAN ASET
TETAP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
PAREPARE**



OLEH

**IRA FASIRA
NIM : 18.2800.024**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak.) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2023

**ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TENTANG PENGELOLAAN ASET
TETAP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
PAREPARE**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak)**

OLEH

**IRA FASIRA
NIM : 18.2800.024**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SAYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2023**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ira Fasira

Nim : 18.2800.024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No:B.1827/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri H, M.Ag (.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M (.....)

NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui:



Dekan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP.19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

JudulSkripsi : Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ira Fasira

Nim : 18.2800.024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No:B.1827/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Tanggal Kelulusan :

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag (Ketua) (.....)

Abdul Hamid, S.E.,M.M (Sekertaris) (.....)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag (Anggota) (.....)

Rusnaena, M.Ag (Anggota) (.....)

Mengetahui:



Dekan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP.19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt, yang maha kuasa atas segala limpahan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak.) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, keluarga dan kerabat tercinta yang menjadi sumber motivasi dan sumber semangat bagi penulis yang memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Nasri H, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing II, atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

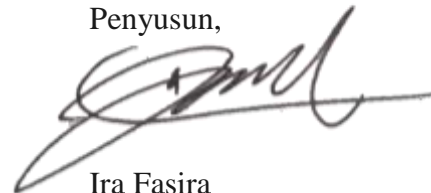
1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., NM.M. selaku Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas dukungan dan bantuannya terhadap penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada penulis.
5. Bapak Sirajuddin, S.Pd.I., S.IPI., M.Pd. selaku kepala Perpustakaan yang telah memberikan wadah untuk menyiapkan referensi dalam skripsi ini.
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahragadan Pariwisata Kota Parepare bapak Amarun Agung Hamka, S.STP., M.Si. beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 20 Januari 2023
27 Jumadil Akhir 1444 H
Penyusun,



Ira Fasira
NIM. 18.2800.024

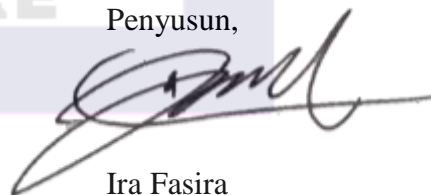
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : IRA FASIRA
NIM : 18.2800.024
Tempat/Tgl. Lahir : SEMPANG, 27 NOVEMBER 2000
Program Studi : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TENTANG
PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PAREPARE

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, duplikat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Januari 2023
27 Jumadil Akhir 1444 H
Penyusun,



Ira Fasira
NIM. 18.2800.024

ABSTRAK

Ira Fasira. *Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare* (dibimbing oleh M. Nasri H dan Abdul Hamid).

Penelitian skripsi ini membahas tentang Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Dilihat dari pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan. Apakah Akuntansi aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menguasai aset daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. aset tersebut berupa aset tetap yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan latar Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan aset tetap serta pengumpulan dokumen dari staf Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Penerapan perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian pengakuan dan penyajian aset tetap pada prinsipnya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 2). Pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap serta penyajian aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare telah sesuai dengan akuntansi syariah yakni dilakukan secara transparan dan amanah tentunya sudah termasuk dalam prinsip syariah. 3). Pengungkapan aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare dicantumkan metode penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan..

Kata kunci : Analisi, Akuntansi Syariah, Aset Tetap

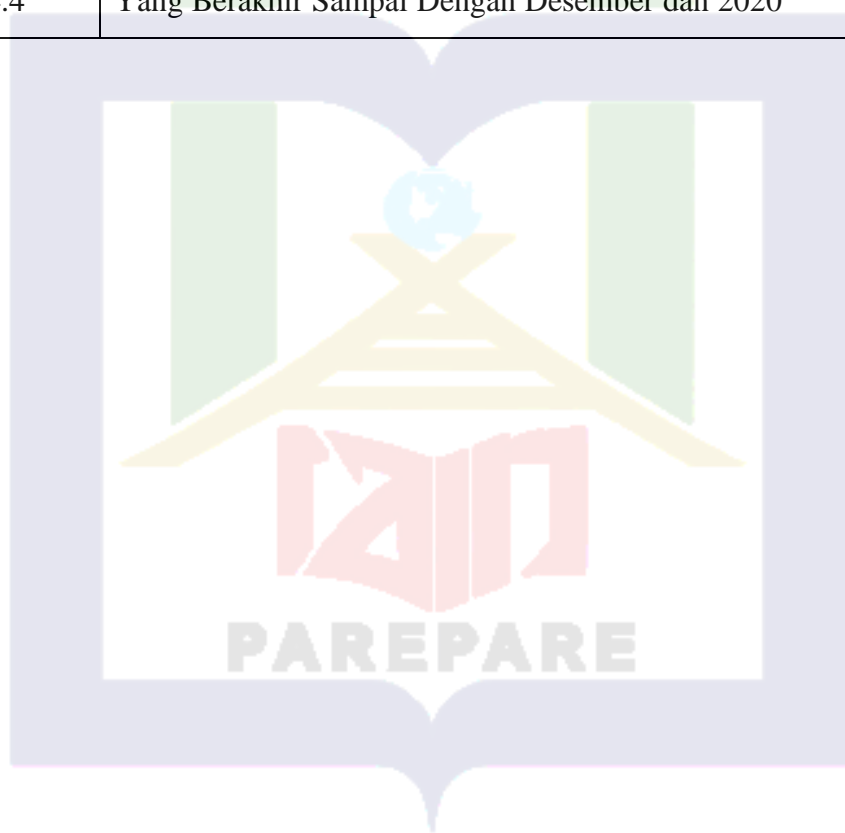
DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Aset Tetap	15
2. Teori Akuntansi Syariah	36

	3. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	42
	C. Kerangka Konseptual	42
	D. Bagan Kerangka Pikir.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
	C. Fokus Penelitian	46
	D. Sumber Data	46
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
	F. Teknis Analisis Data.....	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	49
	B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	75
	B. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Lampiran
4.1	Daftar Aset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare Tahun Anggaran 2005-2021
4.2	Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah Tahun 2005-2021 Rekap Akumulasi Penyusutan Tahun 2020
4.3	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun
4.4	Yang Berakhir Sampai Dengan Desember dan 2020



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Lampiran
2.1	Bagang Kerangka Fikir
4.1	Daftar Aset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare Tahun Anggaran 2005-2021
4.2	Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah Tahun 2005-2021 Rekap Akumulasi Penyusutan Tahun 2020
4.3	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun
4.4	Yang Berakhir Sampai Dengan Desember dan 2020



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	REKOMENDASI PENELITIAN
2	SURAT IZIN PENELITIAN
3	KETERANGAN SELESAI MENELITI
4	PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA
5	IDENTITAS INFORMAN
6	DOKUMENTASI
7	BIODATA PENULIS



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	Be
ت	Tâ'	t	Te
ث	Śâ'	ś	Es (dengan titik atas)
ج	Jîm	j	Je
ح	Ĥâ'	ĥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Khâ'	kh	kadan ha
د	Dâl	d	De
ذ	Zâl	z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Râ'	r	Er
ز	Zâi	z	Zet
س	Sîn	s	Es
ش	Syîn	sy	Esdanye
ص	Şâd	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fâ'	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâw	w	W
ها	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yâ	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Fathah + alif جاهليه	Ditulis	Â <i>Jâhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تنسي	ditulis	Â <i>Tansâ</i>
Kasrah + yâ mati كريم	ditulis	Î <i>Karîm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	Û <i>Furûd</i>

3. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Fathah + yâ' mati بينكم	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + wâwu mati قول	Ditulis	au <i>qaul</i>

C. *Tâ' Marbûtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرا مهالا ولياء	ditulis	<i>karâmahal-auliyâ'</i>
-----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâhal-fîṭr</i>
------------	---------	---------------------

D. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

1. Bila diikuti huruf *qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggandakan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

E. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

F. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

1. *Fī ẓilāl al-qur'an*
2. *Al-sunnah qabl al-tadwin*
3. *Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

G. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *Dīnullah, billah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh: *Hum fī rahmatillāh*

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak sekali pihak yang membutuhkan informasi keuangan untuk digunakan dalam mengambil keputusan yang bersifat ekonomis. Makin majunya peradaban dan kegiatan ekonomi . makin penting pula informasi tersebut. Informasi keuangan salah satunya dihasilkan melalui akuntansi.¹ Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelolaan, pengikhtisaran dengan cara tertentu, dalam ukuran moneter, transaksi, kejadian kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Adapun *accounting Principles Board* memberikan definisi akuntansi sebagai kegiatan yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang dan suatu badan ekonomi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam berbagai alternatif. Akuntansi dapat dijelaskan dalam berbagai sudut pandang, yaitu akuntansi sebagai system pencatatan (*bookkeeping system*), system informasi (*Information or reporting system*), system ekonomi social (*social and economic system*), dan system pertanggungjawaban (*responsibility system*).

Akuntansi merupakan domain muamalah dalam kajian islam. Artinya, diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Akan tetapi, karena pentingnya permasalahan ini Allah swt, menyebutkan perihal muamalah dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 282. Penempatan ayat ini juga unik dan relavan dengan sifat akuntansi. Ia ditetapkan dalam surat Al-Baqarah sebagai lambing komoditas ekonomi.

¹ Saifuddin Rosita Vega Savitri, "Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Manajemen Bisnis Dan Inovasi* 5 (2018): 120.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُوا لِيَمْلَأَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 3 tentang surat Al-Baqarah ayat 282 ini mengemukakan beberapa hal yang relavan dengan akuntansi, yaitu sebagai berikut.

“Perhatikan tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah untuk menuliskan utang piutang. Itulah orang-orang yang berbuat sesuatu

karena Allah karena melaksanakan perintah Allah. Oleh sebab itu tidaklah dengan alasan berbuat baik kepada kedua belah pihak, salah satu pihak berkata, “tidak perlu dituliskan karena kita saling mempercayai”. Padahal, umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah. Si anu mati dalam berutang, dan orang yang memberi utang akan menagih pada ahli warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian. Ia mengungkapkan secara jelas betapa wajibnya menuliskan semua transaksi yang dilakukan. Perintah inilah yang selalu diabaikan umat islam sekang ini. Bahkan, muncul anggapan bahwa menulis transaksi seperti ini menunjukkan kekurangpercayaan satu sama lain, padahal ini merupakan perintah Allah SWT kepada umatnya yang harus dipatuhi.

Apabila kita mempelajari sejarah islam, ditemukan setelah munculnya islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Dan terbentuk daulah Islamiah di Madinah, yang dilanjutkan oleh para khulafaur Rasyidin terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr), dan anggaran Negara. Rasulullah saw. Pun telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan). Bahkan, Al-Qur'an sebagai kitab suci untuk islam menganggap masalah ini sebagai masalah serius dengan diturunkan ayat terpanjang, yakni surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut. Sebagai mana dalam awal ayat tersebut dinyatakan:

”wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang

penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai mana Allah mengajarkannya...”

Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Qur'an telah diturunkan pada tahun 610 M, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494.²

Berdasarkan bidang-bidang yang digarap, akuntansi dapat digolongkan menjadi beberapa golongan salah satunya adalah Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yaitu akuntansi yang tujuan utamanya menyajikan laporan keuangan unit usaha. Berdasarkan jenis usahanya, akuntansi keuangan terdiri atas akuntansi usaha pabrik, akuntansi usaha dagang, akuntansi usaha jasa, akuntansi usaha perbankan, akuntansi usaha asuransi, akuntansi usaha kontraktor, akuntansi usaha RS dan sebagainya. Tiap-tiap akuntansi tersebut mempunyai ciri khas dalam penyajian rekening, khususnya yang merupakan ciri dari jenis usaha tertentu, di samping terdapat rekening general (dapat dijumpai di semua jenis usaha, misalnya kas, biaya gaji, utang, modal, Aset, dan lain-lain).

Salah satu dari rekening general dalam pencatatan akuntansi adalah Aset. Pengertian aset menurut FASB *Statement of Financial Accounting Concepts* No. 3 (SFAC No. 3) sebagai berikut: “Aktiva (*assets*) adalah manfaat ekonomis mendatang yang mungkin diperoleh atau dikendalikan oleh kesatuan ekonomi tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa yang lalu”.³

²M.A Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Pustaka Setia Bandung, 2015).

³Siti Maryana Fatrianisa, Rina Tjandrakirana, and Rina Saftiana, “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang,” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* 7, no. 2 (2013): 111–22.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Dilihat dari pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan. Apakah Akuntansi aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menguasai aset daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah . aset tersebut berupa aset tetap yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seperti yang disebutkan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang aset tetap bahwa, aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat di jual kembali untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. Aset tetap merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Tujuan utama dari usaha pemerintah merupakan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan aset tetap menjadi sesuatu yang hal utama dalam memberikan pelayanan tersebut.⁴

Definisi aktiva ini berlaku bagi perusahaan bisnis dan perusahaan nonbisnis. Aktiva menurut FASB (1985) memiliki tiga karakteristik penting. Ketiga karakter tersebut adalah: (1) Manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti, yang meliputi

⁴Alfrianda, *Akuntansi , Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, Pengertian Aset, Edisi 8* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

kapasitas untuk menyumbang secara langsung atau tak langsung terhadap aliran masuk kas bersih di masa mendatang, (2) sebuah entitas tertentu dapat memperoleh dan mengendalikan akses entitas-entitas lain terhadap manfaat tersebut, dan (3) transaksi atau kejadian lain yang memberikan kenaikan hak atau pengendalian entitas tersebut terhadap manfaat itu telah terjadi.⁵

Aset dalam perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Sedangkan aset tetap merupakan aset perusahaan yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud contohnya: mesin, peralatan, kendaraan, bangunan dan tanah. Aset tetap tidak berwujud, contohnya: *software*, merek dagang, lisensi dan formula, resep, desain dan lain-lain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu: pembelian, pembangunan, serta sumbangan. Perusahaan perlu melakukan perawatan secara berkala terhadap aset tetap, agar mengurangi resiko penghentian pemakaian aset tetap karena kerusakan. Aset tetap setiap tahunnya memiliki nilai penyusutan. Setelah masa manfaat aset tetap habis, biasanya perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap. Perusahaan melakukan pencatatan aset tetap pada saat perolehan, pemeliharaan/perawatan, penyusutan sampai dengan penghentian pemakaian aset tetap.⁶

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DKOP) Kota Parepare merupakan suatu lembaga yang bergerak pada bidang Olahraga, Pemuda, Pariwisata

⁵ Slamet Sugiri, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Akademi Ma. (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005).

⁶ M. Setiadi Hartoko, "Aset Tetap (Studi Kasus Di PT IFCA PROPERTY365 INDONESIA)," *Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5 No. 1 (2017): 121.

dan Destinasi yang mendukung visi dan misi pemerintah Kota Parepare, kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, peduli, mandiri dan berkarakter, dengan memfokuskan pembangunan infrastuktur di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.

Aset tetap yang dimiliki Lembaga tersebut adalah aset berwujud antara lain tanah, bangunan, peralatan kantor, kendaraan kantor dan Lain-Lain. Berdasarkan Latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan aset tetap dengan menggunakan perhitungan berdasarkan Akuntansi Syariah pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata kota Parepare tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset tetap dengan perhitungan berdasarkan Akuntansi Syariah pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata kota Parepare pada tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk membawa wawasan mengenai akuntansi syariah tentang aset tetap baik secara teoritis maupun praktik yang diterapkan lembaga tersebut.

2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas masalah ini di masa yang akan datang.
3. Bermanfaat bagi lembaga tersebut sebagai masukan dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan atas kekurangan yang ada pada lembaga tersebut yang berhubungan dengan aset tetap.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Penelitian Relevan

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Yensia Prarisama, Nur Sahara Sulistya Dewi Wahyuningsi/2017 ⁷	Perilaku Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP	Perlakuan akuntansi aset tetap pada Hotel Blitar Indah belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP karena hanya pada perolehan aset tetap yang sudah dilakukan perhitungan dan pencatatan sesuai dengan SAK ETAP.	Penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti adalah sama-sama berfokus pada aset tetap.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif 2. Lebih berfokus sesuai SAK ETAP sedangkan peneliti lebih berfokus pada Akuntansi Syariah
Gerry Hasrasyah, Set Asmapane, Ferry Diyanti/2017 ⁸	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan	Perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. ASA Sumber Rezeky telah sesuai dengan standar akuntansi	Penelitian ini sama sama bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif

⁷Yensia Prarisama Nur Sahara and Sulistya Dewi Wahyuningsih, "Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap," *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 2, no. 2 (2017): 51–75, <https://doi.org/10.51289/peta.v2i2.310>.

⁸Gerry Hasrasyah, Set Asmapane, and Ferry Diyanti, "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan," *Kinerja* 14, no. 1 (2018): 31, <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i1.2447>.

		<p>keuangan tentang entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP). Meskipun masih terdapat hal yang perlu disesuaikan dalam pengakuan, pencatatan dan perhitungan aset tetap.</p>	<p>diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan</p>	<p>sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif</p> <p>2. Menggunakan populasi dan sampel penelitian sedangkan peneliti menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya.</p>
<p>Catur Agus Ismawati/2012⁹</p>	<p>Perilaku Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada CV Bahana Karya Gresik</p>	<p>Cv. Bahana Karya dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, dan pengungkapan terhadap aktiva tetap belum sesuai dengan PSAK No. 16</p>	<p>Penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan membahas tentang aset tetap</p>	<p>Penelitian tersebut lebih berfokus pada perilaku dan penyajiannya dalam laporan keuangan. sedangkan penulis lebih berfokus pada penetapan aset tetap dalam perhitungan akuntansi syariah</p>

⁹Catur Agus Ismawati, "Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud Dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada Cv. Bahana Karya Gresik," *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 1, no. 3 (2013): 1–18.

<p>Giunto A. Ratag/2013¹⁰</p>	<p>Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Bank Sulut</p>	<p>Bank Sulut belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap, yang dalam hal ini PT. Bank Sulut melakukan metode penyusutan saldo menurun untuk non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan. Hal ini terbukti jika PT. Bank Sulut menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba kena pajak perusahaan akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan menghemat</p>	<p>Metode pengumpulan datanya menggunakan Sumber data sekunder dimana data sekunder ini merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder penelitian berupa data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, seperti daftar rincian aktiva tetap.</p>	<p>Penelitian tersebut lebih berfokus pada pajak melalui penyusutan aktiva tetap. Sedangkan peneliti berfokus pada penggunaan akuntansi syariah dalam perolehan aset tetap.</p>
--	--	---	---	---

¹⁰Menghitung Pph et al., "Besarnya Beban Penyusutan Yang" 1, no. 3 (2012): 950–58.

		pembayaran pajak/PPH badan terutang. Besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto terlihat mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh badan yang terutang		
--	--	--	--	--

Peneliti melakukan peninjauan atas penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan tema penelitian untuk dijadikan referensi pada hasil penelitian terdahulu di ambil dari 4 penelitian. Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu bahan perbandingan penelitian yang akan dilakukan.

1. Yensia Parisama, Nur Sahara Sulistya Dewi, Wahyuningsi melakukan penelitian tentang “Perilaku Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP”. Pada penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada SAK ETAP. Penulis menggunakan sampel seluruh data aset tetap dan laporan keuangan pada hotel Blitar Indah periode 2014-2016.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlakuan akuntansi aset tetap pada hotel Blitar Indah belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP karena hanya pada perolehan aset tetap yang sudah dilakukan perhitungan dan pencatatan sesuai dengan SAK ETAP .

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama berfokus pada aset tetap. Namun terdapat perbedaan di antaranya adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dan penelitian terdahulu lebih berfokus sesuai SAK ETAP sedangkan peneliti lebih berfokus pada Akuntansi Syariah.

2. Gerry Hasrasyah, Set Asmapane, Ferru diyanti melakukan penelitian tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi aset tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan” pada penelitiannya bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan PT. ASA Sumber Rezeki berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) No. 15 dan pengaruhnya di dalam laporan keuangan. Alat analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah SAK ETAP No. 15 sebagai suatu standar yang telah ditetapkan dalam mengatur perlakuan akuntansi aset tetap. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. ASA Sumber Rezeky telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan tentang entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP). Meskipun masih terdapat hal yang perlu disesuaikan dalam pengakuan, pencatatan dan perhitungan aset tetap.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dimana penelitian ini sama sama bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian terdahulu menggunakan

populasi dan sampel penelitian sedangkan peneliti menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya.

3. Catur Agus Ismawati melakukan penelitian tentang “Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada CV. Bahana Karya Gresik” Pada penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aktiva tetap dan berwujud dan penyajiannya dalam laporan keuangan pada Cv. Bahana Karya Gresik. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Cv. Bahana Karya dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pengungkapan terhadap aktiva tetap masih belum sesuai dengan PSAK No. 16.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan membahas tentang aset tetap. Namun ada juga perbedaan di antara keduanya yaitu Penelitian tersebut lebih berfokus pada perilaku dan penyajiannya dalam laporan keuangan. sedangkan penulis lebih berfokus pada penetapan aset tetap dalam perhitungan akuntansi syariah.

4. Gianto Ratag melakukan penelitian tentang “Perencanaan Pajak Melalui metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Bank Sulut” Pada penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung Pph pada PT Bank Sulut. Dan dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Sulut belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap, yang dalam hal ini PT. Bank Sulut melakukan metode penyusutan saldo menurun untuk non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan. Hal ini

terbukti jika PT. Bank Sulut menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba kena pajak perusahaan akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan menghemat pembayaran pajak/PPH badan terutang. Besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto terlihat mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh badan yang terutang.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Metode pengumpulan datanya menggunakan Sumber data sekunder dimana data sekunder ini merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder penelitian berupa data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, seperti daftar rincian aktiva tetap. Dan tentunya juga memiliki perbedaan antara keduanya yaitu Penelitian tersebut lebih berfokus pada pajak melalui penyusutan aktiva tetap. Sedangkan peneliti berfokus pada penggunaan akuntansi syariah dalam perolehan aset tetap.

B. Tinjauan Teori

Pengambilan tinjauan teori peneliti mengambil teori yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai landasan penelitian. Teori yang dijadikan sebagai tinjauan literatur adalah sebagai berikut :

1. Teori Aset Tetap

a. Pengertian Aset Tetap

Kata aset pertama kali dikenal pada pertengahan abad ke-16, berasal dari bahasa prancis “asez/asetz” yang berarti cukup. International Financial Reporting Standard (IFRS) menyebutkan bahwa aset adalah sumber daya

yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dari sanalah manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. Kekayaan bersih dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban dari aset.

Pada dasarnya aset adalah segala sesuatu yang dimiliki. Dalam konteks yang lebih luas, aset dapat berupa banyak hal, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, jaringan relasi, pendidikan, penguasaan teknologi, seni budaya, nama baik dan kepercayaan public. Bahkan ide informasi dan imajinasi pun dapat menjadi aset yang berharga. Semua perusahaan memiliki aset berwujud yang merupakan pendukung operasional dari perusahaan tersebut.¹¹

Aset tetap merupakan salah satu dari komponen aset (harta) milik perusahaan yang dominan didalam struktur neraca, sedangkan dari segi penggunaannya aset tetap merupakan aset yang paling lama digunakan dalam perusahaan karena aset tetap memiliki umur pemakaian yang paling panjang.

Aset Tetap merupakan salah satu aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan mempunyai manfaat, serta pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas dan kegiatan operasional bagi suatu perusahaan guna membantu untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Aset tetap atau aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diperuntukkan atau dipergunakan demi kepentingan operasional perusahaan atau dengan kata lain aktiva tersebut tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan.¹²

¹¹Suryani Dewi and Linda Miftahul Jannah, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap Pada Pt . Metis Teknologi" 9, no. September (2018).

¹² Sunarno SastroAtmodjo dan Eddy Purnairawan, *Pengantar Akuntansi*, (Bandung: Media Sains Indonesia,2021), h. 1.

Aset tetap menurut elvy aset tetap adalah suatu jenis aset yang akan dibeli atau diperoleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasi/bisnisnya dalam waktu yang panjang.¹³

Aset tetap berwujud atau sering disebut fixed asset merupakan harta kekayaan yang berwujud, relative permanen, dan digunakan dalam operasi regular lebih dari satu tahun. Aset tetap berwujud dibeli dengan tujuan untuk tidak dijual kembali. Aset tetap berwujud terdiri dari atas tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, perabot dan peralatan kantor. Aset tetap berwujud yang umurnya tidak terbatas misalnya tanah, disajikan berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi ini disebut nilai buku atau aset tetap berwujud bersih.¹⁴ Termasuk dalam aset tetap pemerintah ini adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya (misalnya instansi pemerintah) dan hak atas tanah. Sedangkan yang tidak termasuk dalam aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Dari beberapa pengertian dari aset tetap di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai material yang digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, bersifat jangka panjang karena memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.

¹³B A B Ii, "Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012.16.6)," 2012, 5–30.

¹⁴ Bahari et. al, "Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Malalayang Manado," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2) (2018): 210–19.

b. Karakteristik Aset Tetap

Menurut Kieso karakteristik utama aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasional perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai aset tetap.
- 2) Aset-aset tersebut bersifat jangka panjang dan dapat disusutkan. Aset tetap memberikan manfaat selama lebih dari satu tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini untuk beberapa periode mendatang melalui biaya penyusutan periodik, kecuali tanah.
- 3) Aset-aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap adalah asset berwujud yang ditandai dengan keberadaan fisik atau substansi.¹⁵

Tiga karakteristik pokok dari aset tetap menurut Dunia:

- 1) Aset tetap digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan. Karakteristik ini membedakan antara persediaan barang siap jual dan aset tetap pada perusahaan *dealer* mobil yang merupakan persediaan barang dagang, sedangkan mobil yang digunakan untuk antar jemput karyawan merupakan aset tetap.
- 2) Umur atau jangka waktu pemakaian aset tersebut lebih dari satu tahun. Karakteristik ini mengenalkan istilah penyusutan dalam aset tetap yang merupakan alokasi biaya dalam jangka waktu pemakaian atau umur dari aset tetap tersebut.

¹⁵ Kieso,dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah. Volume 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 631.

- 3) Pengeluaran aset tetap harus merupakan pengeluaran yang besar atau material bagi perusahaan.¹⁶

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari aset tetap yang dimiliki perusahaan yaitu aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan tanpa maksud untuk diperjualbelikan yang memiliki nilai material, memiliki wujud fisik serta memiliki umur ekonomis lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari satu tahun.

c. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud yakni:

Aset tetap berwujud terbagi lagi atas:

- 1) Aset tetap yang disusutkan, merupakan aset tetap yang memiliki masa manfaat yang terbatas seperti bangunan, kendaraan, mesinmesin, dan peralatan.
- 2) Aset tetap yang tidak dapat disusutkan, merupakan aset tetap yang memiliki masa manfaat tidak terbatas seperti tanah.

Aset tetap tidak berwujud Aset tetap tidak berwujud adalah aset jangka panjang yang secara fisik tidak bisa dinyatakan dan tidak diperjualbelikan, tetapi digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang termasuk ke dalam aset

¹⁶ Dunia Firdaus, *Pengantar Akuntansi. Edisi Keempat*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, 2013), h. 209.

tetap berwujud adalah paten, hak cipta, *goodwill*, hak merek, biaya riset dan pengembangan, dan wara laba atau *franchises*.¹⁷

Dalam PSAP 07, aset tetap dineraca diklasifikasikan menjadi akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:¹⁸

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan bangunan

¹⁷ Erlina, Omar, dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2018), h. 245.

¹⁸ Priyohari, "Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan)". *priyohari.files.wordpress.com/2009/06/psap-07*. (22 September 2022).

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

4) Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya

d. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui Suatu jumlah rupiah atau kos diakui sebagai aset apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang memengaruhi aset. Pada umumnya pengakuan aset dilakukan bersamaan

dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tersebut.¹⁹ Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut ini:²⁰

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang diberikan oleh pos tersebut.
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya, apabila dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; salah satu tujuan dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

¹⁹ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013), h. 287.

²⁰ Ika Rahmawati Sulistya Ningsih, *“Perlakuan Akuntansi Terhadap Perolehan dan Penghentian Aset Tetap Pemerintah yang Berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah di Kabupaten Sukoharjo”*, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2009), h. 45.

- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya diinstansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.²¹

suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila masa manfaat aset tersebut lebih dari satu periode akuntansi, seperti suku cadang utama dan peralatan siap pakai yang dianggap sudah memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap tersebut sudah diserahkan atau diterima dan kepemilikannya berpindah dan/atau penguasaan

²¹ Fairoza Hilmah KH, “*Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang*”, Skripsi (Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013), h. 6.

secara hukum. Seperti sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum bisa mendapatkan dukungan dari adanya bukti secara hukum dikarenakan masih ada tahapan proses kepemilikan seperti (akta) pada pembelian tanah pada instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus dikui apabila sudah terdapat bukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut berpindah misalnya terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.²²

e. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset tetapi kriteria pengakuan aset. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran (measurability) manfaat ekonomis masa datang.

Pengukuran dalam pembahasan disini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut. Konsep kontinuitas usaha, pos atau sumber ekonomis akan mengalami tiga tahap perlakuan sejalan dengan kegiatan usaha yaitu tahap pemerolehan (acquisition), pengolahan (processing), dan penjualan/penyerahan (sales/delivery). Tahap terakhir (penjualan) melibatkan penyerahan barang atau jasa (keluarnya sumber ekonomis). Secara akuntansi (aliran informasi), aliran fisis suatu

²² Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2008), h. 112.

sumber ekonomik atau objek harus dipresentasi dalam jumlah rupiah sehingga hubungan antar objek bermakna sebagai informasi.²³

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.²⁴

Dalam PSAK no. 16 aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehannya agar bisa memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan jumlah yang diantribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui. Seperti kutipan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang menyatakan bahwa komponen biaya perolehan awal aset tetap meliputi:

²³ Suwardjono, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013), h. 260.

²⁴ Fairoza Hilmah KH, “*Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang*”, Skripsi (Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013), h. 6.

- 1) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembeliannya yang tidak boleh dikurangkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya.
- 2) Biaya yang antribusikan atau dibebankan kepada aset tersebut pada saat pengangkutan ke lokasi dan pembiayaan kondisi yang diinginkan agar aset tetap tersebut siap digunakan dengan keinginan yang dimaksud manajemen.
- 3) Kewajiban atas biaya yang timbul ketika aset tersebut diperoleh adalah estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset.

Dicontohkan dalam PSAK no. 16 paragraf 17 bahwa biaya yang dapat diantribusikan secara langsung meliputi:

- 1) Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau pada saat aset tersebut diperoleh
- 2) Biaya persiapan lahan untuk pabrik
- 3) Biaya penanganan dan penyerahan awal
- 4) Biaya instalasi dan perakitan
- 5) Biaya pengujian aset tersebut apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi dengan hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan berhubungan dengan pengajuan tersebut.

Prinsip biaya perolehan aset tetap yang dibangun sendiri sama halnya dengan perolehan aset tetap dengan pembelian. Dalam hal pengukuran biaya perolehan pada PSAK no. 16 dan PSAP no. 07 keduanya hampir sama, hanya saja secara tegas PSAK no. 16 tidak mengakui biaya perawatan aset tetap

sehari-hari sebagai bagian dari aset tetap tersebut karena biaya tersebut diakui sebagai laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil, yang disebut biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Sedangkan dalam PSAP no. 07 perawatan sehari-hari tidak dibahas secara khusus.

Beberapa cara untuk memperoleh suatu aset tetap diantaranya yakni:

1) Pembelian Tunai

Seperti dalam PSAK no. 16 paragraf 23 perolehan aset tetap dengan menggunakan pembelian tunai dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan. Sehubungan dengan pembelian aset tersebut didalamnya termasuk harga faktur dan biaya-biaya yang meliputi biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Sama halnya dalam PSAP no. 07 paragraf 20 aset tetap diukur dengan biaya perolehan saat kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.

2) Perolehan Melalui Pertukaran

Aset tetap dapat ditukar dengan menggunakan tiga cara yakni ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang tidak sejenis, dan di tukar dengan aset tetap yang sejenis dalam tanda kutip memiliki nilai materil yang setara.

3) Perolehan dari Donasi atau Hadiah

Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dari donasi atau hadiah dicatat sebesar harga pasar atau nilai wajar aset pada saat itu. Dalam PSAK No. 16 dan PSAP No. 07 paragraf 46 harga perolehan aset tetap

dengan harga pasar atau nilai wajar berlaku apabila aset donasi diserahkan tanpa persyaratan apapun yang berhubungan dengan kewajiban suatu entitas kepada pemerintah.

4) Aset yang Dibangun Sendiri

Menurut PSAK No. 16 paragraf 22, biaya perolehan dari aset tetap yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama dengan perolehan aset tetap dengan pembelian. Sedangkan dalam PSAP No. 07 paragraf 37, pengukuran biaya perolehan aset yang dibangun sendiri atau di kontruksi dapat diandalkan dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses kontruksi.²⁵

f. Pengeluaran setelah Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.²⁶

²⁵ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (revisi 2011): Akuntansi Aset Tetap*, (Jakarta: IAI, 2011), h. 9.

²⁶ Fairoza Hilmah KH, “*Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang*”, Skripsi (Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013), h. 6.

Pengeluaran terkait aset tetap setelah pengukuran biaya perolehan awal aset tetap menurut PSAP No 07 paragraf 50 dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni:

- 1) Pengeluaran belanja pemeliharaan setelah aset tetap diperoleh.
- 2) Pengeluaran yang bersifat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat perekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau standar kinerja yang meningkat.²⁷

Kategori yang pertama dalam perlakuan akuntansi adalah dengan membebankan semua pengeluaran yang terjadi sebagai belanja pemeliharaan dengan alasan karena pengeluaran tersebut tidak menambah manfaat terhadap aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut hanya bersifat agar aset tetap tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam proses operasional perusahaan.

Pengeluaran yang termasuk dalam kategori kedua, pengeluaran yang terjadi harus dikapitalisasi atau ditambahkan dalam aset yang bersangkutan sehingga nilai buku dari aset tersebut bertambah. Alasannya adalah agar pengeluaran yang dilakukan menambah masa manfaat dari aset tersebut, sehingga biaya yang dikeluarkan dari aset tersebut menjadi penambah nilai dari aset tetap yang bersangkutan.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh tanah mungkin dihadiahkan kepemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah

²⁷ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (revisi 2011): Akuntansi Aset Tetap*, (Jakarta: IAI, 2011), h. 8.

daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal diatas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.²⁸

g. Penyusutan Aset Tetap

Menurut PSAK No. 16 paragraf 6, pengertian penyusutan adalah alokasi jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya secara sistematis. Umur manfaat adalah periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas. Umur manfaat juga bisa diartikan sebagai jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari suatu aset oleh entitas. Berdasarkan PSAP No. 07 Paragraf 53-34, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan unuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.²⁹

Pengertian dari nilai residu aset menurut PSAK No. 16 paragraf 6 adalah jumlah estimasi yang didapatkan oleh entitas saat pelepasan aset,

²⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 SAP Pernyataan No. 07. Lampiran IX.

²⁹ Erlina, Omar, dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2018), h. 269.

setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan jika aset tersebut telah mencapai umur manfaat dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaat.³⁰ Salah satu dasar yang mendasari penyusutan adalah perbandingan biaya dan pendapatan, dengan demikian aset tetap yang memberikan manfaat selama periode tertentu harus disusutkan nilainya sepanjang periode tersebut.

Aset tetap berwujud disusutkan menggunakan metode penyusutan. Untuk mengalokasikan harga perolehan aset tetap dari periode ke periode terdapat beberapa metode yang digunakan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode yang sistematis dan rasional yang mencerminkan manfaat ekonomi masa depan aset tetap yang diharapkan untuk digunakan oleh perusahaan. Metode penyusutan yang dapat digunakan menurut PSAP No. 07 paragraf 56 dan PSAK No. 16 paragraf 63 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit produksi.

1) Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode garis lurus menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu bukan fungsi penggunaan, di mana beban penyusutan dalam metode garis lurus dialokasikan berdasarkan berlalunya waktu. Oleh karena itu, jumlah beban penyusutan periodik setiap periodenya sama. Rumus untuk menghitung beban penyusutan menggunakan metode garis lurus ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban penyusutan per tahun} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai sisa}}{\text{Manfaat taksiran dalam tahun}}$$

³⁰ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (revisi 2011): Akuntansi Aset Tetap*, (Jakarta: IAI, 2011), h. 3.

Penggunaan rumus di atas, dalam menghitung beban penyusutan periodik dapat pula dengan mengonversi umur aset tetap ke dalam bentuk persentase. Untuk menentukan besarnya persentase tarif penyusutan umur aset tetap dapat dilakukan dengan membagi angka 100% dengan umur manfaat taksiran aset tetap tersebut.³¹

2) Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Dalam metode saldo menurun, besarnya nilai beban penyusutan aset tetap di awal-awal tahun aset tersebut diperoleh lebih tinggi dan beban penyusutan di tahun-tahun berikutnya lebih rendah. Pada metode ini, tarif penyusutan dinyatakan dalam bentuk presentase. Besarnya tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali dari tarif metode garis lurus. Apabila masa manfaat taksiran adalah 5 tahun, maka tarif untuk metode saldo menurun ialah 40%, yaitu dua kali tarif metode garis lurus sebesar 20% ($100\% : 5$). Beban penyusutan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Beban penyusutan} = \text{Tarif penyusutan} \times \text{Nilai buku awal tahun.}^{32}$$

3) Metode jumlah unit produksi (*unit of production method*)

Dasar untuk mengetahui metode jumlah unit produksi pada besarnya beban penyusutan adalah pada taksiran jumlah unit produksi yang dapat dihasilkan oleh aset tetap tersebut selama umur ekonomisnya.

Dalam metode ini, penyusutan dihitung dalam dua tahap. Tahap pertama

³¹ Erlina, Omar, dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2018), h. 272.

³² Erlina, Omar, dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2018), h. 272.

menentukan tarif perusahaan untuk setiap unit produksi, dan tahap kedua yaitu menentukan beban penyusutan untuk periode akuntansi dengan mengalikan tarif penyusutan per unit dengan jumlah unit produksi yang sesungguhnya digunakan selama periode tersebut.

Langkah awal yang dilakukan dalam menentukan besarnya beban penyusutan menggunakan metode jumlah unit produksi ialah dengan menghitung besar tarif penyusutan dengan perhitungan berikut ini :

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai sisa}}{\text{Manfaat taksiran dalam jumlah jam}}$$

Setelah menghitung tarif penyusutan, kemudian menentukan besarnya beban penyusutan dengan perhitungan berikut ini :

$$\text{Beban penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Jumlah unit produksi yang sesungguhnya.}^{33}$$

h. Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Dalam PSAK No. 16 paragraf 67 menyatakan bahwa aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau pada saat tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan sebagai selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset tetap serta harus diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif.³⁴

³³ Erlina, Omar, dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2018), h. 273.

³⁴ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (revisi 2011): Akuntansi Aset Tetap*, (Jakarta: IAI, 2011), h. 20.

Apabila menggunakan model revaluasi atau nilai wajar dan pengakuan suatu aset tetap dihentikan, maka praktik yang umum berlaku adalah semua akun yang terkait harus dihapuskan dari laporan keuangan. Oleh karena itu apabila revaluasi aset tetap yang sebelumnya dihentikan, bukan hanya jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutannya saja yang harus dihapus, tetapi juga cadangan revaluasi terkait. Perlakuan terhadap cadangan revaluasi dapat dipindahkan secara langsung ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan.

Pernyataan dalam PSAP No. 07 paragraf 76 mengungkapkan bahwa aset tetap yang tereliminasi dari klasifikasi aset tetap yang utuh atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomisnya di masa yang akan datang, maka akan dihapuskan dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap pemerintah yang tidak memenuhi definisi aset tetap akan dihentikan dari penggunaan aktifnya dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya yang sesuai dengan nilai tercatatnya.³⁵

i. Penyajian Aset Tetap

Penyajian aset non lancar dineraca berdasarkan klasifikasi aset berwujud (*tangible assets*) dan non berwujud (*intangible assets*). Aset tetap dikategorikan sebagai aset berwujud. Aset tetap tersebut disajikan dineraca bersamaan dengan akumulasi penyusutannya. Untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif atas laporan keuangan pemerintah perlu mengungkapkan informasi tambahan.³⁶

³⁵ Dewan Standar Akuntansi Pemerintah, *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Akuntansi Aset Tetap*, (Jakarta: IAI, 2005), h. 11.

³⁶ Sharifuddin Husen, "Analisis Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap didalam Laporan Barang Milik Negara pada Departemen Kesehatan RI", *Jurnal Eksekutif* 4, No. 3 (2007): h.549.

Tanah disajikan dineraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh. Peralatan dan mesin disajikan dineraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Akumulasi penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi total nilai aset tetap.³⁷

j. Pengungkapan Aset Tetap

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.³⁸ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara mengamanatkan agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh kementerian keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementrian Negara/lembaga.³⁹

³⁷ Fairoza Hilmah KH, “*Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang*”, Skripsi (Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013), h. 6.

³⁸ Fairoza Hilmah KH, “*Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang*”, Skripsi (Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013), h. 6.

³⁹ Sharifuddin Husen, “*Analisis Pemanfaatan Akuntansi dan Manajemen Aset Tetap didalam Laporan Barang Milik Negara pada Departemen Kesehatan RI*”, Jurnal Eksekutif 4, No. 3 (2007): h. 551.

2. Teori Akuntansi Syariah

Teori akuntansi syariah menurut pendekatan idealis diwakili oleh Iwan Triyuwono dan Aji Dedi Mulawarman. Teori Akuntansi Syariah Menurut Triyuwono (2012, 2015) adalah satu set prinsip yang diturunkan secara logis untuk dijadikan referensi dalam mengukur kelayakan praktik akuntansi dan dalam mengembangkan akuntansi yang bisa memberikan pedoman bagi praktik akuntansi yang benar.

Teori akuntansi syariah menurut Aji Dedi Mulawarman dirumuskan dengan teori akuntansi syariah secara berurutan yaitu yang pertama yaitu adalah tujuan akuntansi syariah yang mengandung arti bahwa akuntansi syariah adalah realisasi kecintaan kepada Allah SWT sehingga pertanggung jawaban pencatatan sampai pelaporan secara mental, dan spiritual harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁴⁰

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Secara umum, akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kita akan menitik beratkan pembahasan pada akuntansi dan peranannya dalam bisnis.⁴¹

Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai:

⁴⁰Dudi Abdul Hadi, "Pengembangan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia," no. 204 (2018): 106–23.

⁴¹James M. Reeve. et.al, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, (Jakarta; Salemba Empat, 2011), h. 9.

“Suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi”⁴².

Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini juga menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus:⁴³

- 1) Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil.
- 2) Memproses atau menganalisis data yang relevan.
- 3) Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Menurut *American Accounting Association (AAA)* Akuntansi adalah proses mengidentifikasi/mengenal, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Belkaoui dalam buku *Teori Akuntansinya* sebagaimana dikutip Harahap disebutkan beberapa image (citra) yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Haryono Yusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, (Yogyakarta, 2003), h. 4.

⁴³ Haryono Yusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, (Yogyakarta, 2003), h. 5.

⁴⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta; Salemba Empat, 2013), h. 2.

- 1) Akuntansi sebagai ideologi, karena akuntansi dinilai menopang atau sub sistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak pemilik modal.
- 2) Akuntansi sebagai suatu bahasa, karena ia menyampaikan, mengkomunikasikan tentang perusahaan kepada pihak lain yang memerlukan informasi itu. Akuntansi sama dengan bahasa, sama-sama memiliki aturan gramatika dan terminologi khusus.
- 3) Akuntansi sebagai suatu catatan historis, ia hanya mencatat apa yang sudah terjadi, dan akuntansi tidak dapat mencatat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- 4) Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini, ia sudah merupakan bagian dari sistem ekonomi dan sistem bisnis.
- 5) Akuntansi sebagai suatu sistem informasi karena ia mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan.
- 6) Akuntansi dianggap sebagai pertanggungjawaban, dalam hal ini akuntansi dianggap merupakan sarana manajemen pertanggungjawaban pengelolaannya atas harta kekayaan perusahaan yang diamanahkan pemiliknya

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi secara teknis adalah kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan perusahaan dan akhirnya menginterpretasikan laporan tersebut. Sedang syari'ah adalah berasal dari

kata *syara'a* yang berarti memperkenalkan, mengedepankan, menetapkan. *Syara'a* sering disebut *syara'* atau *syir'ah*.

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah, definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

b. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Setiap Muslim diatur oleh ketentuan syari'ah (hukum Islam) yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw, tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah swt. Islam memang sudah mengatur segala tata cara hidup manusia, tidak terkecuali muamalah. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah sebagai lambang komoditi ekonomi, ayat 282 yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca, serta dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah merupakan surat ke-2 yang dapat dianalogikan dengan "double entry". Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-hutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya dengan

adil, dan janganlah seseorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,”⁴⁵

Kalimat *kataba* (menulis) menurut sebagian ulama bukan kewajiban, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun begitu dalam ayat tersebut mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena itu sudah merupakan suatu kebutuhan.⁴⁶

c. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap (Harta) Dalam Perspektif Islam

1) Pengakuan aset tetap (cara memperoleh dan memanfaatkan aset)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)dibangkitkan.

Sejalan dengan ayat di atas bahwa akuntansi dalam islam adalah sebuah informasi yang digunakan untuk memahami aktifitas bisnis yang dijadikan oleh para pengguna informasi dalam meningkatkan kesejahteraan. Dan juga pemilikan harta dapat diperoleh dengan cara usaha yang halal sesuai dengan aturan Allah swt.⁴⁷

2) Pengukuran Aset Tetap

⁴⁵ Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 282, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus; Mubarakatan Toyyibah, 1998), h. 48.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta; Lentera Hati, 2017), h. 563-564.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta; Kencana, 2012), h. 61.

﴿١٨١﴾ وَأَوْفُوا بِالْكَيلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٤﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Dalam tafsir Almaroghi jika kalian berjualan, maka takarlah pembelian mereka dengan sempurna dan janganlah kalian merugikan hak mereka sehingga kalian memberikannya dalam keadaan kurang. Kemudian jika kalian membeli maka ambillah seperti jika kalian menjual.

3) Penyajian aset Tetap

Dalam perspektif akuntansi syariah konsep dasar penyajian dan pengungkapan aset tetap berpedoman kepada al-quran dan assunnah Penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan harus menekankan pada keadilan, kewajaran, pertanggungjawaban serta keridhoan. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-hutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya dengan adil, dan janganlah seseorang penulisan enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,”

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa , melalui akuntansi seseorang dapat mengetahui dengan baik dan benar laporan keuangan terhadap transaksi, neraca, atau laba-rugi yang pernah dilakukan. Yang mana konsep pengungkapan laporan keuangan harus taat pada hukum syariat, melaporkan dengan akurat accountable dan transparan, informasi akuntansi harus mampu melaporkan setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat. Dan penentuan laba- rugi yang tepat.⁴⁸ (Faton,i 2014: 303).

3. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Parepare merupakan suatu lembaga yang bergerak pada bidang Olahraga, Pemuda, Pariwisata dan Destinasi yang mendukung visi dan misi pemerintah kota parepare, kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, peduli, mandiri dan berkarakter, dengan memfokuskan pembangunan infrastruktur di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.

C. Tinjauan Konseptual

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam konsep akuntansi syariah, akuntansi merupakan domain muamalah dalam kajian islam. Artinya, diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Akan

⁴⁸ Fathoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasa-Dasar Ekonomi Islam)*, Bandung; Pustaka Setia, 2014), h. 303.

tetapi, karena pentingnya permasalahan ini Allah SWT, menyebutkan perihal muamalah dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 282.

Dimana kita ketahui akuntansi adalah proses/aktivitas yang menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan informasi keuangan untuk kepentingan penggunanya. Akuntansi dapat dijelaskan dalam berbagai sudut pandang, yaitu akuntansi sebagai system pencatatan (*bookkeeping system*), system informasi (*Information or reporting system*), system ekonomi social (*social and economic system*), dan system pertanggungjawaban (*responsibility system*).

Berdasarkan bidang-bidang yang digarap, akuntansi dapat digolongkan menjadi beberapa golongan salah satunya adalah Akuntansi keuangan, Akuntansi keuangan yaitu akuntansi yang tujuan utamanya menyajikan laporan keuangan unit usaha. Dalam akuntansi Keuangan ini terdapat Salah satu rekening general dalam pencatatannya adalah Aset.

Aset dalam perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Sedangkan aset tetap merupakan aset perusahaan yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Namun pada penelitian yang akan di teliti oleh peneliti lebih berfokus pada pengelolaan aset tetap pada Dinas Kepemudaan dan Pariwisata yang pengelolaannya berdasarkan Akuntansi Syariah.

Aset tetap merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Tujuan utama dari usaha pemerintah merupakan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan aset tetap menjadi sesuatu yang utama dalam memberikan pelayanan tersebut.

D. Bagan Kerangka Berpikir

Bagian yang dibuat oleh peneliti merupakan kerangka yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terkait judul yang diteliti yaitu “Analisis Akuntansi Syariah Tentang pengelolaan Aset Tetap Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare” berikut bagan kerangka pikir :



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Serta berusaha memahami dan menafsirkan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.⁴⁹

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami secara ilmiah tentang pengelolaan aset tetap di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang berkaitan dengan prosedur Akuntansi Syariah dengan menggunakan alat pengumpul data atau instrument penelitian seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dimana peneliti merupakan key instrument atau dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun langsung ke lapangan secara aktif.

Peneliti menggali informasi tentang pengelolaan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata kota Parepare yang dimana aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap di suatu daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan sebuah nilai tambah dalam mengelola aset daerah, menjadi modal awal

⁴⁹Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif," 2013, 1–14.

bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menjaga peran dan fungsi pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Setelah peneliti melakukan observasi lapangan maka ditetapkan lokasi penelitian pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare di Jalan Beringin No. 4 Parepare

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini direncanakan berlangsung sejak dikeluarkannya surat keputusan penetapan judul, dan berakhir sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

C. Fokus Penelitian

Penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah bagi peneliti berguna untuk memperjelas fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada Akuntansi Syariah sebagai media pencatatan dalam pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.

D. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Person* (Orang) yaitu pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare bagian pengelola aset .
2. *Place* (Tempat) yaitu kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare bagian aset.

3. *Paper* (Dokumen) merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu. Bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti catatan, arsip database, surat-surat yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam melaksanakan penelitian tersebut menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

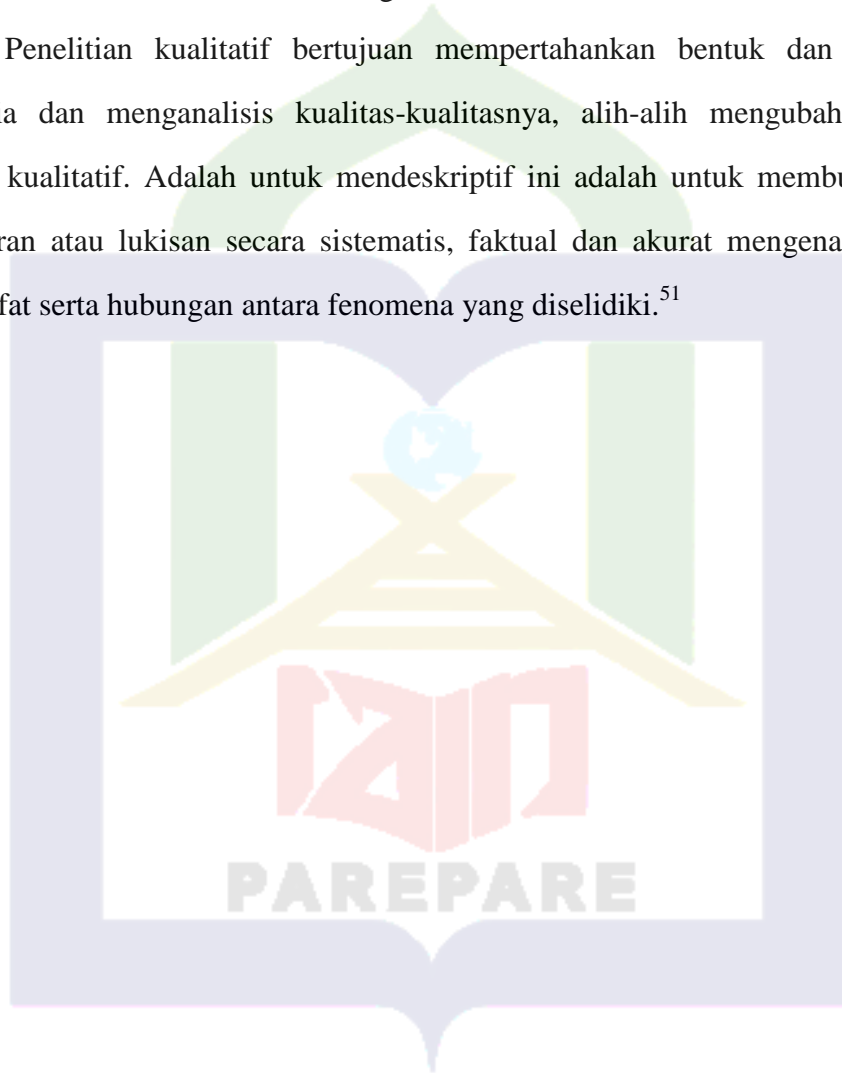
1. Pengamatan (Observasi) dengan pengumpulan data atau informasi secara langsung terhadap objek penelitian, hal tersebut dilakukan dengan kunjungan langsung dan mengamati lokasi yang terkait terhadap lingkungan pengelolaan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
2. Wawancara (Interview) merupakan cara untuk memperoleh data dengan melakukan komunikasi secara langsung atau *face to face* dengan pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare pada bagian aset untuk memperoleh keterangan tambahan dari data yang diperoleh sebelumnya.
3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai pengelolaan aset tetap Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang berupa Dokumen *softcopy*, buku, surat kabar, dan catatan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.⁵⁰

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas kualitatif. Adalah untuk mendeskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁵¹



⁵⁰Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. media, video call dalam teknologi komunikasi (2017): 210–11.

⁵¹Dhita Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan," *Jurnal Lontara* 6, no. media, communication, young women, information, healthy (2018): 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam penyajian data yang dipaparkan oleh peneliti, berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data yang telah diperoleh dengan terperinci sesuai dengan fokus masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti yakni sebagai berikut :

1. Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare

Aset merupakan suatu barang atau alat yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Perlakuan akuntansi atas aset tetap yang baik dan teliti pada perusahaan sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan penyusutan dan pengelolaannya yang berpengaruh pada besar kecilnya laba yang dihasilkan. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare merupakan salah satu unsur Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang olahraga, pemuda dan pariwisata yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan kepala bagian keuangan dan kepala bagian pengelola aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Berikut ini

merupakan penjelasan dari perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.

a. Klasifikasi Aset Tetap

Pembagian aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dibagi menjadi 6, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Daftar Aset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare Tahun Anggaran 2005-2021

NO URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
1	01	01	TANAH			21.783.638.037,75
2	02		PERALATAN DAN MESIN			4.009.503.390,55
		01	a. Alat Besar			-
		02	b. Alat Angkutan			1.757.894.650,00
		03	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur			4.500.000,00
		04	d. Alat Pertanian			-
		05	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga			755.041.740,55
		06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			156.397.000,00
		07	g. Alat Kedokteran			-
		08	h. Alat Laboratorium			-
		09	i. Alat Peralatan			-
		10	j. Komputer			383.713.600,00
		11	k. Alat Eksplorasi			
		12	l. Alat Pengeboran			
		13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
		14	n. Alat Bantu Eksplorasi			
		15	o. Alat Keselamatan Kerja			67.640.000,00
		16	p. Alat Peraga			
		17	q. Peralatan Proses/Produksi			
		18	r. Rambu -Rambu			296.733.850,00
		19	s. Peralatan Olah Raga			587.582.550,00
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN			29.612.684.607,00
		01	a. Bangunan Gedung			26.480.086.333,00

		02	b.	Monumen		2.314.774.100,00
		03	c.	Bangunan Menara		
		04	d.	Tugu Titik Kontrol/Pasti		817.824.174,00
4	04			JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		1.214.202.800,00
		01	a.	Jalan dan Jembatan		-
		02	b.	Bangunan Air		1.116.217.725,00
		03	c.	Instalasi		97.985.075,00
		04	d.	Jaringan		-
5	05			ASET TETAP LAINNYA		68.381.332,00
		01	a.	Bahan Perpustakaan		-
		02	b.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		68.381.332,00
		03	c.	Hewan		-
		04	d.	Biota Perairan		
		05	e.	Tanaman		
		06	f.	Barang Koleksi Non Budaya		
		07	g.	Aset Tetap Dalam Renovasi		
6	06			KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		1.242.545.420,00
				JUMLAH		57.930.955.587,30

(Sumber data: Dokumen KIB DISPORAPAR Kota Parepare)

Pencatatan aset tetap pada Kartu Inventaris Barang dibagi menjadi Kartu Inventaris Barang (KIB) A hingga Kartu Inventaris Barang (KIB) F. Kemudian Kartu Inventaris Barang (KIB) ini dibagi menjadi beberapa subbagian sesuai lokasi dinas, BPPLP, dan objek objek wisata.

Pada tabel di atas, pembagian aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare sudah sesuai atau tidak berbeda dengan PSAK No, 16 dan PSAK No. 07. Dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare telah sesuai dan tidak terdapat masalah yang perlu diperbaiki.

b. Pengakuan Aset Tetap

Untuk mempermudah pencatatan aset tetap Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare mengklasifikasikannya menjadi 6

5	Tanah Bangunan asrama	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	625	200	5	JL. Perintis Kemerdekaan KM12 Tamalanre Makassar	Pakai	10/26/2000	200	03	Bagunan Asrama HIPMI pare	APBD	500.000.000,00	Berdasarkan Hasil Appraisers
6	Tanah GOR	Tanah untuk bangunan sarana olah raga tertutup	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.513	200	7	Kel.Lompoe Kec.Bacukiki	Pakai	20-04-2011	563	GOR	APBD	610.429.124,58		
7	Tanah GOR	Tanah untuk bangunan sarana olah raga tertutup	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.928	200	7	Kel.Lompoe Kec.Bacukiki	Pakai	20-04-2011	561	GOR	APBD	200.628.913,16		
8	Tanah Lapangan	Tanah lapangan sepak bola	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	500	200	5	Kel. Lompoe	Pakai	20-04-2011	562	Lapangan Sepak Bola Lompoe	APBD	250.200.000,00		
9	Tanah Lapangan	Tanah lapangan sepak bola	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	514	200	5	Kel. Lemo	Pakai	20-04-2011	11	Lapangan Sepak Bola Lemo	APBD	102.920.000,00		
10	Tanah lapangan	Tanah lapangan sepak bola	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	762	200	5	JL. Jalur Dua Kec. Bacukiki	Pakai	4/4/2004	18	Bagunan Lapangan upacara Kota	APBD	915.360.000,00		
11	Tanah Bagunan stadion Gelora mandiri	Tanah untuk bangunan sarana olah raga tertutup	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	400	200	5	JL. Stadion gelora mandiri	Pakai	9/5/2007	558	Bagunan stadion gelora mandiri	APBD	2.000.000.000,00		
12	Tanah lapangan sepak bola	Tanah lapangan sepak bola	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	174	200	5	Jln/ Bau Masepe	Pakai	3/7/1991	80	Bagunan lapangan sepak bola Andi Makassar	APBD	13.970.400.000,00		
Jumlah																							21.783.638.037,75					

(Sumber data: Dokumen KIB DISPORAPAR Kota Parepare)

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin milik Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan total nilai Rp. 4.009.503.390,55 terdiri dari berikut ini:

- a) Alat-alat Angkutan sebesar Rp.1.757.894.650,00 sebanyak 21 unit yang masing-masing diperoleh pada tahun 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017, 2020 dan 2021.
- b) Alat bengkel dan alat ukur sebanyak 1 alat dengan nilai Rp.4.500.000,00 yang diperoleh pada tahun 2015.
- c) Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 667 alat dengan nilai Rp.755.041.740,55 yang masing-masing diperoleh pada tahun 1997 s/d 2021.
- d) Alat studio, komunikasi dan pemancar sejumlah 18 alat dengan nilai Rp.156.397.000,00 yang diperoleh pada tahun 2007, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.
- e) Komputer dengan berbagai merek sebanyak 48 komputer dengan nilai Rp.383.713.600,00 yang masing-masing diperoleh pada tahun 2007, 2011, 2014, 2015 hingga 2021 komputer terus di *up date* atau diperoleh.
- f) Alat keselamatan kerja sejumlah 28 alat dengan nilai Rp.67.640.000,00 yang diperoleh pada tahun 2018 dan 2020.
- g) Rambu-rambu sebanyak 2 jenis dengan nilai Rp.296.733.850,00 yang diperoleh pada tahun 2020.

h) Peralatan olahraga sebanyak 26 alat dengan nilai Rp.587.582.550,00 yang diperoleh pada tahun 2010, 2018, 2020 dan 2021.⁵²

3) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan merupakan jenis aset tetap yang ada pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dan bersumber dari APBD Kota Parepare dengan status milik pemerintah Kota Parepare yang terdiri dari bangunan gedung sebanyak 77 bangunan, monument sebanyak 3 jenis dan tugu itik kontrol/pasti 5 dengan total nilai Rp.29.612.684.607,00 yang masing-masing yakni Bangunan Gedung Kantor Permanen, Gedung Olah Raga Tetutup Permanen, Asrama Permanen, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen, Gedung Olah Raga Tetutup Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen, Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semi permanen, Tugu Peringatan Lainnya, Pagar Permanen serta Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan yang ada di Kota Parepare.⁵³

4) Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan adalah jenis aset tetap yang mana merupakan milik pemerintah daerah yang berguna untuk kelangsungan kegiatan operasional Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Aset tetap jenis ini pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan

⁵² Dokumen KIB DISPORAPAR Kota Parepare 2021

⁵³ Dokumen KIB DISPORAPAR Kota Parepare 2021

Pariwisata Kota Parepare ialah Bangunan Air dengan nilai Rp.1.116.217.725,00 dan Instalasi dengan nilai Rp.97.985.075,00.⁵⁴

5) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya yang dimiliki Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare berupa barang dengan corak kesenian/kebudayaan/olahraga dengan total nilai Rp.68.381.332,00 yang digunakan untuk mendukung kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.

6) Kontruksi dalam pengerjaan

Jenis aset tetap kontruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun yang terdiri dari 8 jenis item pengerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.242.545.420,00 yang dikerjakan pada tahun 2021 dan 2022.

Perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare diklasifikasikan dapat digunakan lebih dari satu tahun dan memiliki manfaat ekonomis bagi perusahaan. Pengakuan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare terjadi apabila data-data aset tetap tersebut diketahui dan disetujui untuk diakui terlebih dahulu oleh BPKAD Kota Parepare.

Bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd. selaku staff bagian pengelolaan aset tetap DISPORAPAR Kota Parepare menyatakan bahwa:

Dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kota parepare Lebih mengacu pada peraturan daerah dalam negeri nomor 19 Tahun 2016. Aset yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sepenuhnya merupakan milik

⁵⁴ Dokumen KIB DISPORAPAR Kota Parepare 2021

daerah. Mulai dari pengadaan barang, pengelolaan, hingga penghapusan semua mengacu peraturan daerah tersebut.

Dalam pengelolaannya berawal dari modal yang diberikan kemudian dianggarkan ke aset tetap selama masa pemanfaatan aset tetap dipergunakan sesuai fungsinya selama pemanfaatan terjadi penyusutan. Terkadang ada aset yang mengalami kerusakan atau bahkan sampai hilang.⁵⁵

Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa aset tetap yang ada pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare sepenuhnya merupakan milik pemerintah daerah Kota Parepare dan dalam pengadaan barang, pengelolaan, hingga penghapusan semua mengacu peraturan daerah.

c. Pengukuran Perolehan Aset Tetap

Aset tetap yang diperoleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dicatat sebesar harga perolehannya. Perolehan aset tetap yang terdapat pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dibedakan menjadi beberapa cara yakni sebagai berikut:

1) Pembelian Tunai

Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian langsung dilakukan melalui perantara pihak ketiga atau pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing*. Jenis aset tetap yang diperoleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan pembelian tunai atau pembelian langsung ialah berupa peralatan dan mesin sejumlah 811 barang dengan total pembelian seharga Rp. 4.009.503.390,55 yang masing-masing diperoleh dari tahun 1997 hingga 2021. Serta pembelian langsung berupa barang dengan corak kesenian/ kebudayaan/ olahraga dengan total nilai Rp.68.381.332,00.

⁵⁵ Muhammad Idris, Staff Bagian Pengelolaan Aset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

Bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd. selaku staff bagian pengelolaan asset tetap DISPORAPAR Kota Parepare menyatakan bahwa:

Pengadaan barang mengacup pada peraturan presiden no 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pembelian barang atau asset secara tunai dapat dilakukan melalui perantara pihak ketiga atau pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang /jasa melalui system catalog elektronik atau toko daring.⁵⁶

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pengukuran nilai perolehan aset tetap Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang diperoleh dari APBN/APBD Kota Parepare yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang mengacup pada peraturan presiden no 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni meliputi tanah dengan harga perolehan mengikuti harga pasar atau nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh, gedung dan bangunan dengan harga perolehan yang meliputi biaya-biaya konstruksi yang dikeluarkan hingga selesai dan gedung atau bangunan siap dipakai.

2) Perolehan Aset Tetap dari Hibah

Aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang diperoleh dari hibah/ donasi/ hadiah dicatat sebesar harga

⁵⁶ Muhammad Idris, Staff Bagian Pengelolaan Asset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

pasar atau nilai wajar pada saat perolehan aset tersebut. Aset tetap yang diperoleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dari hibah meliputi tanah, gedung dan bangunan dengan total nilai perolehannya Rp.51.396.322.644,70. Tanah pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare berjumlah 12 tempat dengan nilai Rp.21.783.638.037,75 serta gedung dan bangunan berjumlah 50 gedung dengan nilai perolehan Rp. 29.612.684.607,00.

Bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd. selaku staff bagian pengelolaan aset tetap DISPORAPAR Kota Parepare menyatakan bahwa:

Pengukuran nilai aset tetap di DISPORAPAR Kota Parepare yang diperoleh dari hibah dihitung dan dicatat berdasarkan harga pasar pada saat diperoleh. Aset tersebut merupakan hibah dari pemerintah daerah, sesama instansi atau pihak swasta dan BUMN. Gedung dan bangunan meliputi biaya konstruksi yang dikeluarkan hingga bangunan selesai dan siap digunakan⁵⁷

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pengukuran nilai perolehan aset tetap Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang diperoleh dari hibah pemerintah daerah, sesama instansi atau pihak swasta dan BUMN dicatat berdasarkan harga pasar atau nilai wajar dari aset tersebut. Hibah yang dimaksudkan yakni meliputi tanah dengan harga perolehan mengikuti harga pasar atau nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh, gedung dan bangunan dengan harga perolehan yang meliputi biaya-biaya konstruksi yang dikeluarkan hingga selesai dan gedung atau bangunan siap dipakai.

3) Aset Tetap yang Dibangun Sendiri

⁵⁷ Muhammad Idris, Staff Bagian Pengelolaan Aset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

Pengukuran harga perolehan aset tetap Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang dibangun sendiri meliputi biaya keseluruhan pengeluaran yang terjadi berhubungan dengan pembangunan aset tetap tersebut hingga selesai dan siap digunakan. Aset tetap yang dibangun sendiri pada awalnya dicatat sebagai (KDP) Kontruksi Dalam Pengerjaan dan setelah pembangunan aset tersebut selesai dan siap digunakan, maka aset tersebut diakui sebagai Gedung dan Bangunan milik Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan total nilai kontrak sebesar Rp.1.242.545.420,00 yang dikerjakan pada tahun 2021 dan 2022.

Bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd. selaku staff bagian pengelolaan aset tetap DISPORAPAR Kota Parepare menyatakan bahwa:

Aset tetap yang dibangun sendiri diukur berdasarkan keseluruhan biaya pengeluaran pada saat kontruksi dilakukan. Pembangunan yang belum selesai dibangun sampai tutup tahun dinamakan (KDP) Kontruksi Dalam Pengerjaan, aset yang dibangun sendiri seperti gedung kantor, lapangan olahraga, juga stadion serta beberapa bangunan di tempat tempat wisata yang ada di kota Parepare seperti perahu wisata yang ada di Tonrangeng River Side merupakan aset milik Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.⁵⁸

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa pengukuran biaya perolehan dari aset tetap yang dibangun sendiri didasarkan pada keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat kontruksi dalam pengerjaan atau pembangunannya hingga selesai dan bangunan tersebut siap digunakan. Biaya-biaya yang dimaksud misalnya biaya bunga

⁵⁸ Muhammad Idris, Staff Bagian Pengelolaan Aset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

pinjaman, biaya material, biaya tenaga kerja, biaya pengurusan izin pembangunan dan lain sebagainya.

d. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Biaya selanjutnya yang dikeluarkan atas aset tetap milik Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dibebankan kepada kesesuaian beban yang dikeluarkan. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, aset tetap yang digunakan dalam usahanya memerlukan pengeluaran yang menunjang kebaikan aset tetap tersebut. Seperti contoh perbaikan atas aset tetap atau penambahan pada aset tetap yang diperlukan.

Bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd. selaku staff bagian pengelolaan aset tetap DISPORAPAR Kota Parepare menyatakan bahwa:

Dalam perhitungan pengeluaran aset terdapat dua bentuk yakni belanja konstruksi dan belanja barang. Dimana belanja konstruksi ini merupakan belanja yang hanya untuk kebutuhan pembangunan sedangkan dalam belanja barang dilakukan pada barang yang sudah siap pakai. Dimana dalam biaya belanja barang yang dilakukan secara langsung terhitung sesuai harga barang yang dibelanjakan. Berbeda dengan belanja konstruksi yang biayanya terhitung dari semua biaya yang digunakan sampai barang itu selesai.⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perhitungan pengeluaran aset terdapat dua bentuk yakni belanja konstruksi dan belanja barang. Pengeluaran aset tetap setelah perolehan aset tetap tersebut dimasukkan sesuai kebutuhan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan, jalan irigasi dan bangunan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang meliputi perbaikan, penambahan lantai, serta penambahan lainnya

⁵⁹ Muhammad Idris, Staff Bagian Pengelolaan Asset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

mencantumkan pengeluaran dengan menambahkan harga perolehan aset tetap tersebut. Dimana dalam biaya belanja barang yang dilakukan secara langsung dihitung sesuai harga barang yang dibelanjakan. Berbeda dengan belanja konstruksi yang biayanya dihitung dari semua biaya yang digunakan sampai barang itu selesai.

e. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dikelola oleh bagian keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Dengan hasil perhitungan penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Rekap Akumulasi Penyusutan Tahun 2020

NO UR T	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	AKUMULASI PENYUSUTAN 2021	NILAI BUKU 2021
1	2	3	4	5	6
1	01	01	TANAH		
2	02		PERALATAN DAN MESIN	11.137.939,5	326.333.931
		01	a. Alat Besar	-	
		02	b. Alat Angkutan	1.633.250,0	21.232.250
		03	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	
		04	d. Alat Pertanian	-	
		05	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	708.106	22.715.264
		06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	272.208,3	24.652.792
		07	g. Alat Kedokteran	-	
		08	h. Alat Laboratorium	-	
		09	i. Alat Persenjataan	-	
		10	j. Komputer	3.466.208,3	80.697.791,7
		11	k. Alat Eksplorasi	-	
		12	l. Alat Pengeboran	-	
		13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	
		14	n. Alat Bantu Eksplorasi	-	

		15	o.	Alat Keselamatan Kerja	-	-
		16	p.	Alat Peraga	-	-
		17	q.	Peralatan Proses/Produksi	-	-
		18	r.	Rambu -Rambu	-	-
		19	s.	Peralatan Olah Raga	5.058.166,7	177.035.833,3
3	03			GEDUNG DAN BANGUNAN	-	197.791.860
		01	a.	Bangunan Gedung	-	197.791.860
		02	b.	Monumen	-	-
		03	c.	Bangunan Menara	-	-
		04	d.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
4	04			JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-
		01	a.	Jalan dan Jembatan	-	-
		02	b.	Bangunan Air	-	-
		03	c.	Instalasi	-	-
		04	d.	Jaringan	-	-
5	05			ASET TETAP LAINNYA	-	-
		01	a.	Bahan Perpustakaan	-	-
		02	b.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	-	-
		03	c.	Hewan	-	-
		04	d.	Biota Perairan	-	-
		05	e.	Tanaman	-	-
		06	f.	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
		07	g.	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
6	06			KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
				JUMLAH	11.137.940	524.125.791

(Sumber data: Dokumen DISPORAPAR Kota Parepare)

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Erni Yasir, SE selaku staff bagian keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare menyatakan bahwa:

Sistem pelaporan keuangan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan dasar penagiri no 12 tahun 2021 dengan sistem menggunakan Kartu Inventaris barang (KIB) sesuai tahun berjalan.⁶⁰

⁶⁰ Erni Yasir, Staff Bagian Keuangan DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

Bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd. selaku staff bagian pengelolaan asset tetap DISPORAPAR Kota Parepare terkait dengan metode yang digunakan untuk penyusutan aset tetapnya menyatakan bahwa:

Menggunakan tiga metode pencatatan yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line method*), Metode penyusutan saldo menurun (*Double Declining balance method*), dan metode jumlah angka tahun (*Sum Of The Year Digit*).⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa sistem penghitungan penyusutan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan dasar penagiri no 12 tahun 2021 dengan sistem menggunakan Kartu Inventaris barang (KIB) sesuai tahun berjalan dengan menggunakan tiga metode yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line method*), Metode penyusutan saldo menurun (*Double Declining balance method*), dan metode jumlah angka tahun (*Sum Of The Year Digit*).

f. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Laporan neraca Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare disajikan dengan akumulasi asset tetap sebagai pengurang dari harga perolehan sehingga dapat diketahui nilai bukunya. Berikut rincian aset tetap yang disajikan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare:

Tabel 4.4.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember dan 2020

⁶¹ Muhammad Idris, Staff Bagian Pengelolaan Asset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.819.420,00	97.115.330,00	99,28	115.208.087,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.900.000,00	139.885.950,00	99,99	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	440.737.800,00	430.336.217,00	97,64	196.445.578,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	440.737.800,00	430.336.217,00	97,64	196.445.578,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	148.150.000,00	148.150.000,00	100,00	91.750.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	129.150.000,00	129.150.000,00	100,00	35.200.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	56.550.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	3.044.750.100,00	1.423.676.670,00	46,76	6.885.935.390,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	608.270.100,00	341.167.870,00	56,09	1.494.105.740,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	25.000.000,00	22.865.500,00	91,46	896.302.650,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	25.000.000,00	22.865.500,00	91,46	149.622.000,00
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	746.680.650,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	48.532.100,00	48.348.370,00	99,62	259.067.650,00

5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	36.360.500,00	36.215.370,00	99,60	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.171.600,00	12.133.000,00	99,68	259.067.650,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	250.000.000,00	-	-	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	250.000.000,00	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	84.738.000,00	84.164.000,00	99,32	115.199.600,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	62.808.000,00	62.480.000,00	99,48	33.880.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.930.000,00	21.684.000,00	98,88	81.319.600,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	-	-	-	14.850.000,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	-	-	-	14.850.000,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000,00	185.790.000,00	92,90	208.685.840,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.000.000,00	185.790.000,00	92,90	208.685.840,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.436.480.000,00	1.082.508.800,00	44,43	5.391.829.650,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.236.480.000,00	888.186.900,00	39,71	5.391.829.650,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.236.480.000,00	888.186.900,00	39,71	3.994.022.300,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	1.397.807.350,00
5.2.03.02.	Belanja Modal Monumen	200.000.000,00	194.321.900,00	97,16	-
5.2.03.02.01.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	200.000.000,00	194.321.900,00	7,16	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.186.871.300,00)	(8.327.051.452,00)	-	(11.711.435.018,00)

(Sumber data: Dokumen DISPORAPAR Kota Parepare)

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Erni Yasir, SE selaku staff bagian keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare menyatakan bahwa:

Keseluruhan nilai aset tetap yang dimiliki RSD Balung disajikan pada laporan neraca pada setiap akhir periode dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap.⁶²

Dalam laporan neraca tahun 2020 serta ungkapan di atas dapat diketahui bahwa akumulasi penyusutan pada laporan neraca disajikan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan menggabungkan dalam satu nilai dan menjadi pengurang dari jumlah keseluruhan nilai perolehan aset tetap.

g. Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Penghentian penggunaan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dikategorikan tidak layak pakai, hilang dan rusak berat.

Bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd. selaku staff bagian pengelolaan aset tetap DISPORAPAR Kota Parepare menyatakan bahwa:

Tahap penghapusan ketika barang tersebut sudah tidak layak pakai, hilang dan rusak berat. Ketikabarang tersebut sudah tidak layak pakai maka akan diadakan usul hapus, baik di jual ataupun dilelang. Penghentiannya ketika sudah ada bukti penjualan yang dicantumkan. Apabila barang tersebut hilang baik itu barangnya sudah tidak ditemukan ataupun kelalaian dari pihak pengelola. Jika dalam kelalaian maka ganti rugi dikenakan pada pihak yang bertanggung jawab. Jika barang tersebut tidak ditemukan maka akan langsung dihapuskan melalui persetujuan pimpinan.⁶³

⁶² Erni Yasir, Staff Bagian Keuangan DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

⁶³ Muhammad Idris, Staff Bagian Pengelolaan Aset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan penghentian penggunaan aset dan penghapusan aset pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare ketika barang tersebut sudah tidak layak pakai, hilang dan rusak berat. Ketika barang tersebut sudah tidak layak pakai maka akan diadakan usul hapus, baik di jual ataupun dilelang. Penghentiannya ketika sudah ada bukti penjualan yang dicantumkan.

2. Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap Dengan Menggunakan Perhitungan Berdasarkan Akuntansi Syariah Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare

Aset tetap merupakan aset yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap memerlukan pengelolaan yang baik agar perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikut merupakan uraian pengelolaan akuntansi aset tetap dengan menggunakan perhitungan berdasarkan akuntansi syariah pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare:

a. Pengakuan Aset Tetap pada DISPORAPAR Kota Parepare

Pengakuan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare dicatat sesuai dengan harga perolehan dari aset tersebut dan diklasifikasikan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi dan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan.

Bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd. selaku staff bagian pengelolaan aset tetap DISPORAPAR Kota Parepare menyatakan bahwa:

Standar akuntansi yang digunakan sangat menerapkan Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan yang berpatokan pada Peraturan daerah dalam negeri nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaannya. Juga menggunakan

prinsip Syariah dalam pembukuannya yang bersifat Transparan, amanah, dan jujur dalam setiap pencatatannya.⁶⁴

Dari penjabaran tersebut pengakuan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare telah sesuai dengan akuntansi syariah bahwa akuntansi dalam islam adalah sebuah informasi yang digunakan untuk memahami aktifitas bisnis yang dijadikan oleh para pengguna informasi dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dan juga pemilikan harta dapat diperoleh dengan cara usaha yang halal sesuai dengan aturan Allah swt.⁶⁵

b. Pengukuran Perolehan Aset Tetap pada DISPORAPAR Kota Parepare

Aset tetap yang diperoleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dicatat sebesar harga perolehannya. Perolehan aset tetap yang terdapat pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dibedakan menjadi beberapa cara yakni Pembelian Tunai, Perolehan Aset Tetap dari Hibah dan Aset Tetap yang Dibangun Sendiri. Perolehan aset tetap tersebut yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dicatat berdasarkan harga pasar atau nilai wajar dari aset tersebut serta pengadaan barang mengacup pada peraturan presiden no 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd. selaku staff bagian pengelolaan aset tetap DISPORAPAR Kota Parepare menyatakan bahwa:

⁶⁴ Muhammad Idris, Staff Bagian Pengelolaan Aset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta; Kencana, 2012), h. 61.

Pencatatan aset tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat sebesar harga perolehannya dan sudah termasuk dengan biaya perolehan dari pembelian aset tersebut. Pengukuran nilai aset tetap di RSD Balung yang diperoleh dari hibah dihitung dan dicatat berdasarkan harga pasar pada saat diperoleh. Aset tetap yang dibangun sendiri diukur berdasarkan keseluruhan biaya pengeluaran pada saat konstruksi dilakukan.⁶⁶

Dari penjabaran tersebut pengukuran aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare telah sesuai dengan Dalam tafsir Almaroghi jika kalian berjualan, maka takarlah pembelian mereka dengan sempurna dan janganlah kalian merugikan hak mereka sehingga kalian memberikannya dalam keadaan kurang. Kemudian jika kalian membeli maka ambillah seperti jika kalian menjual.

c. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan neraca aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare yakni akumulasi aset tetap menjadi pengurang dari harga perolehan sehingga dapat diketahui nilai bukunya. Sistem penghitungan penyusutan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan dasar penagri no 12 tahun 2021 dengan sistem menggunakan Kartu Inventaris barang (KIB) sesuai tahun berjalan dengan menggunakan tiga metode yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line method*), Metode penyusutan saldo menurun (*Double Declining balance method*), dan metode jumlah angka tahun (*Sum Of The Year Digit*).

Dalam perspektif akuntansi syariah konsep dasar penyajian dan pengungkapan aset tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan assunnah.

⁶⁶ Muhammad Idris, Staff Bagian Pengelolaan Asset Tetap DISPORAPAR Kota Parepare, wawancara di DISPORAPAR Kota Parepare, 11 Desember 2022.

Penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan harus menekankan pada keadilan, kewajaran, pertanggung jawaban serta keridhoan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan neraca asset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare dilakukan dengan perundang-undangan, sistem dan metode yang mampu memberikan pelaporan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yakni dapat dipertanggung jawabkan.

B. Pembahasan Hasil Penilitia

Disini akan dijelaskan mengenai temuan tentang Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Untuk dapat mengetahui data tentang Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare peneliti melakukan wawancara, pengamatan serta dokumentasi.

Hasil penelitian dari peneliti berbentuk data, hasil wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang berbentuk data yakni informasi mengenai keseluruhan aset tetap yang ada di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dan laporan keuangan atas aset tetap Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan untuk dokumentasi mengenai data pada saat wawancara yakni meliputi foto-foto yang didokumentasikan oleh peneliti.

Untuk mempermudah pencatatan aset tetap Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare mengklasifikasikannya menjadi 6 kategori, yakni tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap

lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Rincian dari daftar aset tetap yang diperoleh dari Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare. Penerapan akuntansi syariah dalam perlakuan akuntansi aset tetap akan mempermudah pengambilan keputusan dan keberlangsungan perusahaan. Dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kota parepare Lebih mengacu pada peraturan daerah dalam negeri nomor 19 Tahun 2016. Aset yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sepenuhnya merupakan milik daerah. Mulai dari pengadaan barang, pengelolaan, hingga penghapusan semua mengacu peraturan daerah tersebut.

Pengukuran harga perolehan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare memiliki beberapa macam cara yakni dari cara perolehan aset tersebut. Berikut merupakan cara-cara aset diperoleh yang meliputi:

1. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian langsung dilakukan melalui perantara pihak ketiga atau pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing*. Jenis aset tetap yang diperoleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan pembelian tunai atau pembelian langsung ialah berupa peralatan dan mesin Serta pembelian langsung berupa barang dengan corak kesenian/ kebudayaan/ olahraga.
2. Aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang diperoleh dari hibah/ donasi/ hadiah dicatat sebesar harga pasar atau nilai wajar pada saat perolehan aset tersebut. Aset tetap yang diperoleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dari hibah meliputi tanah, gedung dan bangunan.

3. Pengukuran harga perolehan aset tetap Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang dibangun sendiri meliputi biaya keseluruhan pengeluaran yang terjadi berhubungan dengan pembangunan aset tetap tersebut hingga selesai dan siap digunakan. Aset tetap yang dibangun sendiri pada awalnya dicatat sebagai (KDP) Kontruksi Dalam Pengerjaan dan setelah pembangunan aset tersebut selesai dan siap digunakan, maka aset tersebut diakui sebagai Gedung dan Bangunan milik Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.

Pengakuan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare telah sesuai dengan akuntansi syariah bahwa akuntansi dalam islam adalah sebuah informasi yang digunakan untuk memahami aktifitas bisnis yang dijadikan oleh para pengguna informasi dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dan juga pemilikan harta dapat diperoleh dengan cara usaha yang halal sesuai dengan aturan Allah swt.

Biaya selanjutnya yang dikeluarkan atas aset tetap milik Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dibebankan kepada kesesuaian beban yang dikeluarkan. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, aset tetap yang digunakan dalam usahanya memerlukan pengeluaran yang menunjang kebaikan aset tetap tersebut. Seperti contoh perbaikan atas aset tetap atau penambahan pada aset tetap yang diperlukan.

Pengukuran aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare telah sesuai dengan Dalam tafsir Almaroghi jika kalian berjualan, maka takarlah pembelian mereka dengan sempurna dan janganlah kalian merugikan hak

mereka sehingga kalian memberikannya dalam keadaan kurang. Kemudian jika kalian membeli maka ambillah seperti jika kalian menjual.

Penyusutan aset tetap dikelola oleh bagian keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan sistem penghitungan penyusutan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare dengan dasar penagri no 12 tahun 2021 dengan sistem menggunakan Kartu Inventaris barang (KIB) sesuai tahun berjalan dengan menggunakan tiga metode yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line method*), Metode penyusutan saldo menurun (*Double Declining balance method*), dan metode jumlah angka tahun (*Sum Of The Year Digit*).

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan neraca aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare dilakukan dengan perundang-undangan, sistem dan metode yang mampu memberikan pelaporan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yakni dapat dipertanggung jawabkan.

Pengelolaan penghentian penggunaan aset dan penghapusan aset pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare ketika barang tersebut sudah tidak layak pakai, hilang dan rusak berat. Ketikabarang tersebut sudah tidak layak pakai maka akan diadakan usul hapus, baik di jual ataupun dilelang. Penghentiannya ketika sudah ada bukti penjualan yang dicantumkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

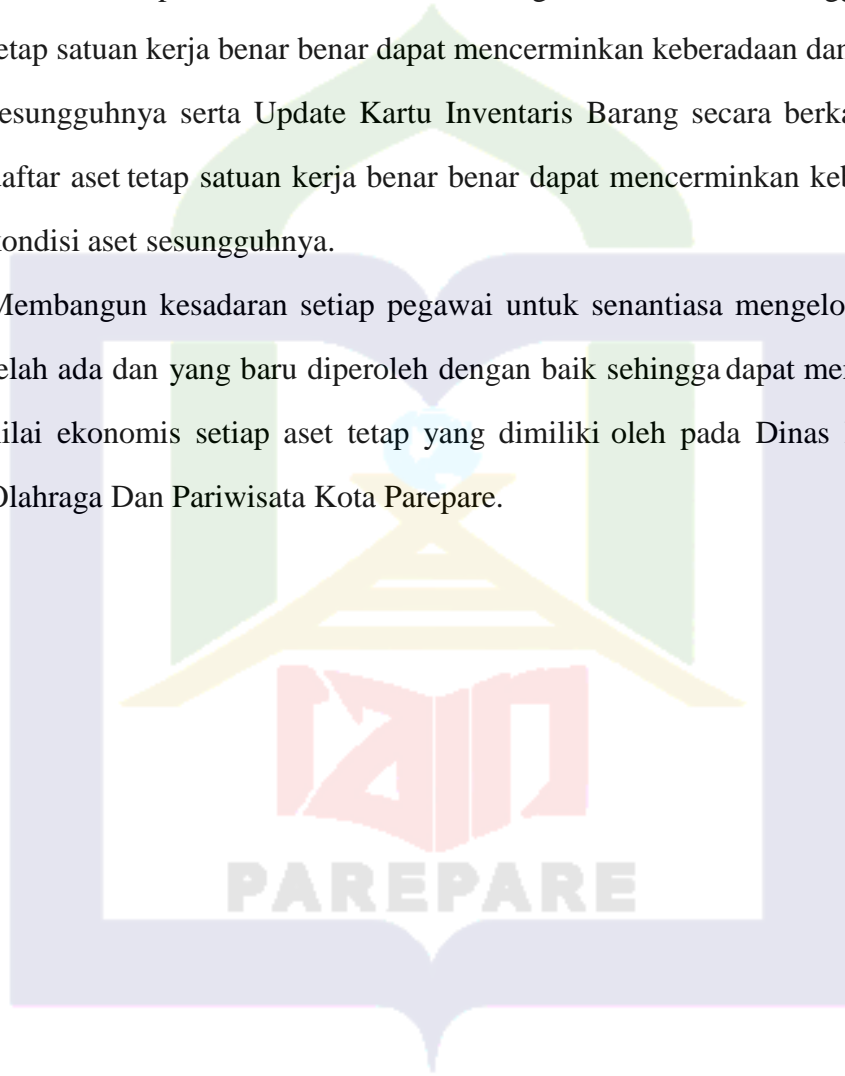
1. Penerapan perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian pengakuan dan penyajian aset tetap pada prinsipnya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap serta penyajian aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare telah sesuai dengan akuntansi syariah yakni dilakukan secara transparan dan amanah tentunya sudah termasuk dalam prinsip syariah.
3. Pengungkapan aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare dicantumkan metode penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas tentang Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, penulis memberikan saran yang diharapkan

dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang.

1. Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare sekiranya dapat melakukan Update Kartu Inventaris Barang secara berkala, sehingga daftar aset tetap satuan kerja benar benar dapat mencerminkan keberadaan dan kondisi aset sesungguhnya serta Update Kartu Inventaris Barang secara berkala, sehingga daftar aset tetap satuan kerja benar benar dapat mencerminkan keberadaan dan kondisi aset sesungguhnya.
2. Membangun kesadaran setiap pegawai untuk senantiasa mengelola aset yang telah ada dan yang baru diperoleh dengan baik sehingga dapat memaksimalkan nilai ekonomis setiap aset tetap yang dimiliki oleh pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Alfrianda. *Akuntansi , Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, Pengertian Aset, Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Bahari et. al. "Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Malalayang Manado." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2) (2018): 210–19.

Dewi, Suryani, and Linda Miftahul Jannah. "ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET TETAP PADA PT . METIS TEKNOLOGI" 9, no. September (2018).

Dhita Prasanti. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan." *Jurnal Lontara* 6, no. media, communication, young women, information, healthy (2018): 16.

Fatrianisa, Siti Maryana, Rina Tjandrakirana, and Rina Saftiana. "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* 7, no. 2 (2013): 111–22.

Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif," 2013, 1–14.

Hadi, Dudi Abdul. "Pengembangan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia," no. 204 (2018): 106–23.

Hartoko, M. Setiadi. "Aset Tetap (Studi Kasus Di PT IFCA PROPERTY365 INDONESIA)." *Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5 No. 1 (2017): 121.

Hasransyah, Gerry, Set Asmapane, and Ferry Diyanti. "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan." *Kinerja* 14, no. 1 (2018): 31. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i1.2447>.

Ii, B A B. "Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012.16.6)," 2012, 5–30.

Ismawati, Catur Agus. "Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud Dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada Cv. Bahana Karya Gresik." *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 1, no. 3 (2013): 1–18.

Nur Sahara, Yensia Prarisma, and Sulistya Dewi Wahyuningsih. "Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 2, no. 2 (2017): 51–75. <https://doi.org/10.51289/peta.v2i2.310>.

Pph, Menghitung, Badan Pada, P T Bank, Fakultas Ekonomi, and Jurusan Akuntansi. "Besarnya Beban Penyusutan Yang" 1, no. 3 (2012): 950–58.

- Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi.” *Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. media, video call dalam teknologi komunikasi (2017): 210–11.
- Prof. Dr. Slamet Sugiri, M.B.A., Akt. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Akademi Ma. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Rosita Vega Savitri, Saifuddin. “Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *Manajemen Bisnis Dan Inovasi* 5 (2018): 120.
- Sarip Muslim, S.Ag., M.A. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Pustaka Setia Bandung, 2015.





LAMPIRAN

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1827/In.39.8/PP.00.9/6/2021 8 Juni 2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. M. Nasri H, M.Ag.** **(Pembimbing Utama)**
2. Abdul Hamid, S.E., M.M. **(Pembimbing Pendamping)**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Ira Fasira
 NIM. : 18.2800.024
 Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **16 April 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TENTANG PENGELOLAAN ASET TETAP DINAS
 KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

emil
 Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

SURAT IZIN PENELITIAN

	SRN IP000832
<p>PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0411) 28594 Faksimile (0411) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</small></p>	
<p>REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 832/IP/DPM-PTSP/11/2022</p>	
<p>Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
<p>Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :</p>	
M E N G I Z I N K A N	
KEPADA NAMA :	IRA FASIRA
UNIVERSITAS/ LEMBAGA :	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan :	AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
ALAMAT :	SEMPANG BARAT, PATAMPANUA, KAB. PINRANG
UNTUK :	melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN :	ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TENTANG PENGELOLAAN ASET TETAP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE
LOKASI PENELITIAN :	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE
LAMA PENELITIAN :	21 November 2022 s.d 21 Desember 2022
<p>a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan</p>	
<p>Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 22 November 2022</p>	
<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</p>	
<p> Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019</p>	
<p>Biaya : Rp. 0.00</p>	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSI**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mendaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRcode)



Balai Serifikasi Elektronik



KETERANGAN SELESAI MENELITI


PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN PARIWISATA
 Jl. Sempang No. 4 Parepare - Email : disaparepare@pdpd@gmail.com Kode Pos : 91122
KOTA PAREPARE

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 800 / 25 / 003P

Yang Bertanda Tangan dituliskan (di):
 Nama : **AMARUN AGUNG HANKA, S.STP.,M.Si**
 Np : 59811003 200012 1 003
 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb
 Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare
 Instansi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare

Menandatangani Bahwa :
 Nama : **IRA YASRA**
 Riwayat : Akuntans Lembaga Keuangan Syariah
 Urutan/Jabatan : Untuk Agensi Islam Negeri (AIN) Parepare
 Alamat : Sempang Kurat, Palampantia, Kali Pinang

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/awancara dengan judul penelitian "ANALISIS AKUNTANS SYARIAH TENTANG PENGELOLAAN ASET TETAP DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE" yang dilaksanakan mulai pada tanggal 21 November 2021 s.d. 21 Desember 2022 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Januari 2023
 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare

AMARUN AGUNG HANKA, S.STP.,M.Si
 Pangkat : Pembina Tk. I / IV b
 No : 59811003 200012 1 003


PAREPARE



NAMA MAHASISWA : IRA FASIRA
 NIM : 18.2800.024
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TENTANG
 PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS
 KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Parepare. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

A. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pkerjaan/Jabatan :
- d. Alamat :

B. Daftar Pertanyaan

a. Pedoman Wawancara Staf Bag. Pengelolaan Aset Tetap

1. Bagaimanasistem pengelolaanasettetappadaDinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?
2. Apakahstandarakuntansi yang digunakan, sepenuhnya SAP ataujugamenggunakan SAK Syariah?
3. Apakah pada saat perolehan aset tetap menggunakan akad jual beli dengan rekanan?
4. Bagaimana pengukuran perolehan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berdasarkan aset tetap yang diperolehdari:
 - a) Pembelian tunai
 - b) Pertukaran sesama asset
 - c) Hibah/Donasi/Hadiah
 - d) Dibangun sendiri
5. Bagaimanapenghitunganpengeluaranasettetap, setelahperolehanasettetaptersebutpadaDinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?
6. Metodeapa yang digunakanolehDinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota ParepareuntukpenyusutanAsetTetapnya?
7. Bagaimana penghitungan penyusutan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?
8. Bagaimana penghentian pengakuan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare ketika aset tetap tersebut rusak atau tidak layak pakai?

9. Jika aset tetap di lelang apakah prosedurnya memperhatikan dan sesuai dengan rukun syariah?
10. Bagaimana perlakuan (jurnal) akuntansi terhadap aset tetap yang telah di lelang?

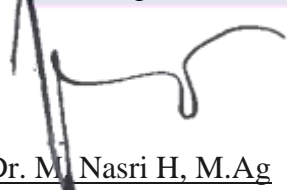
b. Pedoman Wawancara Staf Bag. Keuangan

1. Bagaimana sistem pelaporan keuangan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?
2. Metode apa yang digunakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare untuk penyusutan Aset Tetapnya?
3. Bagaimana penghitungan penyusutan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?
4. Bagaimana penyusunan laporan neraca pengelolaan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?
5. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?

Parepare, 01 Agustus 2022

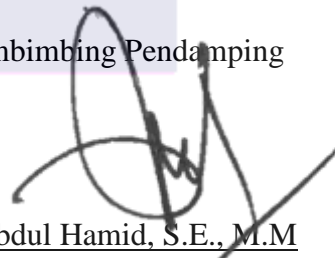
Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Dr. M. Nasri H. M.Ag
NIP. 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping



Abdul Hamid, S.E., M.M
NIP. 19720929 200801 1 012



NAMA MAHASISWA : IRA FASIRA
 NIM : 18.2800.024
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TENTANG
 PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS
 KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KOTA PAREPARE

TRANSKIP WAWANCARA

a. Hasil Wawancara Dengan Staf Bag. Pengelolaan Aset Tetap

1. Bagaimana sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?

Jawaban:

Dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kota parepare Lebih mengacu pada peraturan daerah dalam negeri nomor 19 Tahun 2016. Asset yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sepenuhnya merupakan milik daerah. Mulai dari pengadaan barang, pengelolaan, hingga penghapusan semua mengacup peraturan daera htersebut.

Dalam pengelolaannya berawal dari modal yang diberikan kemudian dianggarkan ke aset tetap selama masa pemanfaatan aset tetap dipergunakan sesuai fungsinya selama pemanfaatan terjadi penyusutan. Terkadang ada asset yang mengalami kerusakan atau bahkan sampai hilang.

2. Apakah standara kuntansi yang digunakan, sepenuhnya SAP atau juga menggunakan SAK Syariah?

Jawaban:

Sangat menerapkan Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan yang berpatokan pada Peraturan daerah dalam negrinomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaannya.

Juga menggunakan prinsip Syariah dalam pembukuannya yang bersifat Transparan, amanah, dan jujur dalam setiap pencatatannya.

3. Apakah pada saat perolehan aset tetap menggunakan akad jual beli dengan rekanan?

Jawaban:

Dalam perolehan aset tetap berasal dari rencana kebutuhan milik daerah serta dokumen pelaksanaan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian belanja langsung atau menggunakan pihak ketiga (rekanan) dalam perolehannya jika aset yang harganya dibawa dua ratus juta rupiah itu biasanya belanja langsung tetapi juga kebanyakan menggunakan rekanan dalam proses pengadaan aset tersebut tidak menggunakan akta tetapi menggunakan perjanjian kontrak.

4. Bagaimana pengukuran perolehan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berdasarkan aset tetap yang diperoleh dari:

a) Pembelian tunai

Jawaban:

Pengadaan barang mengacu pada peraturan presiden no 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pembelian barang atau aset secara tunai dapat dilakukan melalui perantara pihak ketiga atau pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang /jasa melalui system catalog elektronik atau toko daring.

b) Pertukaran sesama aset

Jawaban:

Pertukaran atau barter tidak diberlakukan tetapi bentuk perolehan aset dilakukan dengan system mutasi (dari satu dinas ke dinas yang lain). Barter dilakukan pada aset yang memiliki masamfaat yang lama seperti Tanah dan Bangunan

c) Hibah/Donasi/Hadiah

Jawaban:

Hasil Hiba yang diperoleh dari sesama instansi atau pihak swasta dan BUMN

d) Dibangun sendiri

Jawaban:

aset yang dibangun sendiri seperti gedung kantor, lapangan olahraga, juga stadion serta beberapa bangunan di tempat wisata yang ada di kota

Parepare seperti perahu wisata yang ada di Tonrangeng River Side merupakan aset milik Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.

5. Bagaimana penghitungan pengeluaran aset tetap, setelah perolehan aset tetap tersebut pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?

Jawaban:

Dalam perhitungan pengeluaran aset terdapat dua bentuk yakni belanja konstruksi dan belanja barang. Dimana belanja konstruksi ini merupakan belanja yang hanya untuk kebutuhan pembangunan sedangkan dalam belanja barang dilakukan pada barang yang sudah siap pakai.

Dimana dalam biaya belanja barang yang dilakukan secara langsung terhitung sesuai harga barang yang dibelanjakan. Berbeda dengan belanja konstruksi yang biayanya terhitung dari semua biaya yang digunakan sampai barang itu selesai.

6. Metode apa yang digunakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare untuk penyusutan Aset Tetapnya?

Jawaban:

Menggunakan tiga metode pencatatan yaitu metode penyusutan garis lurus (straight line method), Metode penyusutan saldo menurun (Double Declining balance method), dan metode jumlah angkatahun (Sum Of The Year Digit).

7. Bagaimana penghitungan penyusutan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?

Jawaban:

Dalam penyusutannya menggunakan metode garis lurus sebagai laporan akhir. Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan membagi perolehan nilai sisa dengan estimasi waktu penggunaan aset. Rumus metode Garis Lurus Adalah (Harga Perolehan – Nilai Residu) :Usia ekonomis.

8. Bagaimana penghentian pengakuan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare ketika aset tetap tersebut rusak atau tidak layak pakai?

Jawaban:

Tahap penghapusan ketika barang tersebut sudah tidak layak pakai, hilang dan rusak berat.

Ketika barang tersebut sudah tidak layak pakai maka akan di adakan usul hapus, baik di jual ataupun dilelang. Penghentiannya ketika sudah ada bukti penjualan yang dicantumkan.

Apabila barang tersebut hilang baik itu barangnya sudah tidak ditemukan ataupun kelalaian dari pihak pengelola. Jika dalam kelalaian maka ganti rugi dikenakan pada pihak yang bertanggungjawab.

Jika barang tersebut tidak ditemukan maka akan langsung dihapuskan melalui

persetujuan pimpinan.

9. Jika asset tetap di lelang apakah prosedurnya memperhatikan dan sesuai dengan rukun syariah?

Jawaban:

Pelelangan dilakukan secara transparan dan amanah tentunya sudah termasuk dalam prinsip syariah.

10. Bagaimana perlakuan (jurnal) akuntansi terhadap asset tetap yang telah di lelang?

Jawaban:

Dimasukkan dalam neraca aset barang yang diusul hapus yang dimana aset tersebut mengurangi saldo akhir.

b. Hasil Wawancara Dengan Staf Bag. Keuangan

1. Bagaimana system pelaporan keuangan asset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?

Jawaban:

Dengan dasar penagri no 12 tahun 2021 dengan sistem menggunakan Kartu Inventaris barang (KIB) sesuai tahun berjalan

2. Metodeapa yang digunakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare untuk penyusutan Aset Tetapnya?

Jawaban:

Menggunakan Metode Garis Lurus

3. Bagaimana penghitungan penyusutan asset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?

Jawaban:

Pembuatan Laporan Rekapitulasi Aset

4. Bagaimana penyusunan laporan neraca pengelolaan asset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?

Jawaban:

Perhitungan lebih ke metode garis lurus

5. Bagaimana penyajian danpengungkapan asset tetap dalam laporan keuangan perusahaan padaDinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare?

Jawaban:

Disajikan dalam bentukberita acara

IDENTITAS INFORMAN**IDENTITAS INFORMAN**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUHAMMAD IDRIS, S.PD, M.Pd
 UMUR : 43 TAHUN
 PKERJAAN/JABATAN : PRAGUNUS BARANG (ASET TETAP) DKOP
 ALAMAT : Jl. JEND. SUDIRMAN NO. 68C, PAREPARE

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : IRA FASIRA
 NIM : 18.2800.024
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan SKRIPSI yang berjudul "Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare"

Demikian ketengan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 2022

NARASUMBER



(MUHAMMAD IDRIS, S.PD, M.Pd

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Ira Fasira lahir di Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 November 2000, dari ayah bernama Tamrin dan ibu bernama Hasmia. Penulis memulai jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) Negeri 126 Patampanua pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama (SMP)

Negeri 2 Pinrang pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015 setelah itu melanjutkan pendidikan di sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Pinrang pada tahun 2015 sampai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2018. sampai dengan menulis skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis juga aktif di berbagai organisasi diantaranya PMR, Pencak Silat, Kelompok Studi Ekonomi Islam Forum Ekonomi Syariah, Asosiasi Duta Pariwisata Kota Parepare dan Asosiasi Duta Wisata Sulawesi Selatan. Selama menjalani jenjang pendidikan di IAIN Parepare, penulis juga bekerja di PT. Bank Sulselbar dari tahun 2021 sampai saat ini. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2023. Dengan judul skripsi” Analisis Akuntansi Syariah Tentang Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare”.